



Catatan Beranda

Optimalisasi Pelayanan Publik

Alhamdulillah, September 2016, edisi perdana Newsletter tentang informasi sekitar tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas akhirnya terbit. Tentu bukan tugas mudah dan selalu ada tantangan untuk menerbitkan informasi kegiatan secara reguler, terlebih tim penyusun juga merupakan pelaksana kegiatan teknis. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat staf kreatif di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) untuk memberikan sesuatu yang berbeda kepada publik melalui media cetak.

Tiga kata kunci (*keyword*) terkait penyebaran informasi kepada publik yaitu akurat, mudah diakses, dan dapat berbagi pakai. Ketiganya menjadi pilar utama penulisan materi dalam Newsletter ini. Sebagaimana juga diamanahkan dalam Undang-undang No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan Perpres No. 9/2016 tentang percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta.

Berlatar belakang semangat tersebut, Newsletter ini menjadi bagian dari usaha

kami untuk meningkatkan pelayanan publik di PPTRA. Informasi dalam Newsletter ini meliputi isu atau kebijakan strategis dibidang pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, atlas, potret kegiatan, resensi buku/kajian, serta status terakhir asistensi dan rekomendasi peta tata ruang yang sejalan dengan PP No. 8/2013 tentang ketelitian peta rencana tata ruang.

Selamat membaca dan berbagi informasi, kami ingin memberi bukti bukan janji. [September 2016]



SKP dan Sasaran Kinerja Pegawai

Perjanjian kinerja kembali ditandatangani oleh pejabat struktural Badan Informasi Geospasial dan era pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) *online* pun dimulai. Para pegawai yang merasa berkepentingan dengan tugas jabatan mulai sibuk mencermati kolom-kolom pengisian SKP baru berbasis *Balanced Score Card* (BSC).

Apa sebenarnya perjanjian kerja dan SKP? Menurut UU No. 13 tahun 2003 pasal 1 ayat

14, perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Pihak pekerja yaitu pegawai wajib mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sementara pihak pemberi kerja berhak atas kinerja individu yang baik.

Dengan demikian pegawai berhak atas upah atau gaji dengan berbagai fasilitas dari BIG. Kinerja itu harus terukur untuk setiap individu, untuk itulah diperlukan SKP.

SKP ini adalah Sasaran Kinerja Pegawai yang ada dalam salah satu unsur penilaian prestasi kerja, diatur dalam peraturan baku pemerintah. SKP ukurannya kinerja pribadi bukan output kegiatan yang sebenarnya kinerja organisasi. Oleh karena itu, bukan jamannya lagi pegawai yang datang hanya untuk absen dan menghilang, masih menerima tunjangan kinerja.

Bagaimana sasaran kinerja Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas untuk 2016? Pelaksanaan program di PPTRA jelang akhir triwulan keempat memperlihatkan

peningkatan yang signifikan dari bulan-bulan sebelumnya. Di sisi lain, beberapa keberhasilan dan keterlambatan pekerjaan kontraktual mulai dirasakan sebagai dampak kontrol kualitas pekerjaan kontrak. Beberapa penyedia jasa merasakan dampak supervisi yang ketat melalui peningkatan kontrol kualitas baik lewat FGD, maupun rapat monitoring. Kemajuan teknis harus sesuai dengan pengajuan termin dan administrasi akan mengikuti.

Pada awalnya kebijakan ini memang mengakibatkan keterlambatan penarikan termin yang berdampak pada penyerapan, namun kami yakin selanjutnya akan berjalan dengan normal dan lebih baik. [Oktober 2016]

Produk dan Manfaat PPTRA untuk Bangsa

"Apa sih produk PTRR? sibuk setiap hari memberi asistensi tapi tidak ada data, ganti saja jadi pusat konsultasi tata ruang, di sentra peta juga tidak banyak yang membeli, jangan asal membuat program, dan tidak ada masalah kok penyerapan kecil potong saja anggarannya?"

Demikian beberapa ungkapan hiperbolis yang sering kami dengar. Meski sedih dan ingin menjawab, tetapi dalam etika birokrasi itu tidak baik. Bila berpikir positif, sepahit apapun ungkapan semua itu menjadi masukan, bahkan introspeksi dan energi dalam bekerja. Untuk itulah kami bersyukur di tengah kesibukan akhir tahun, Newsletter edisi November 2016 ini tetap hadir menyapa pembaca menyajikan potret kegiatan di sekitar pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya dan atlas. Kami

yakin produk bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan sebuah program. *"Don't judge program by product, but by the impact and mission"*. Kami bekerja sesuai tupoksi, dikaitkan UU, Renstra, RPJMN, Prioritas Nasional, prioritas bidang dan bahkan tugas lain dari pimpinan.

Kami menjalankan program utama yaitu: Pemanfaatan IGT strategis, Integrasi peta IGT strategis, Pembinaan dan sosialisasi kebijakan bidang tata ruang, dinamika sumberdaya dan Atlas. Pemanfaatan IGT adalah porsi terbesar program di PPTRA, karena menunjukkan nilai tambah IGT dari sekadar menghasilkan IGT yang belum tentu diperlukan. Jenis tematik sangat banyak dan tidak mungkin dikerjakan oleh satu sektoral, BIG hanya membina sektor tersebut. Keluarnya Perpres 9/2016 tentang kebijakan satu peta adalah salah satu dampak dari program kebermanfaatannya IG buat pembangunan.

Adanya PP 8/2013 yang mewajibkan peta tata ruang divalidasi BIG juga bukan suatu kebetulan, atau rencana Kemendikbud menggunakan peta taktual sebagai bahan ajar untuk sekolah-sekolah tuna netra bukan tanpa koordinasi. Itulah sebagian dampak program PTRA. Saat ini kami kerja keras sosialisasi atlas NKRI dan kewilayahan, agar masyarakat terbuka bahwa Indonesia negara luas dan besar dibandingkan negara tetangga. Bukan hanya negara Asean saja, ada Papua Nugini, Solomon, Palau dan seluruh wilayah Melanesia dan Asia Pasifik juga tetangga kita. Itu misi BIG dan juga misi kami di PPTRA, bila ada warga Indonesia yang tidak mengetahui informasi kewilayahan, maka itu salah kami.

Oktober 2016 adalah puncak kesibukan

sekaligus kegembiraan bagi kami di PPTRA. Puncak kesibukan, karena semua staf teknis mulai disibukkan dengan *review* draft laporan akhir. Namun Oktober juga bulan kegembiraan, karena semaraknya peringatan hari Geospasial puncaknya tanggal 17 Oktober. Di bulan Oktober pula kami mulai merasa aura menyambut era baru di BIG dimana “**bangkit dan terbarukan**” mulai membuahkan hasil. Siapapun pemimpin BIG, Kita ucapkan selamat. Kami ingin menjadi akar, meski tak terlihat, terbenam dalam tanah dan sering terinjak, tetap tulus hidup menguatkan batang, menghidupi daun dan bunga dan menghasilkan buah untuk mendukung kehidupan. [November 2016]

Berbenah Menyambut Pimpinan Baru

Alhamdulillahirrobil ‘alamin, penghujung akhir tahun 2016 untuk BIG sungguh membahagiakan. Pemimpin baru BIG akhirnya ditetapkan presiden dan resmi dilantik pada tanggal 5 Desember 2016 oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Segenap redaksi Newsletter dan staf PPTRA mengucapkan selamat atas pelantikan Prof Dr. Hasanuddin Zainal Abidin, M.Eng selaku kepala BIG yang baru.

Guru besar ITB Bandung akan meneruskan estafet kepemimpinan BIG dari Dr. Priyadi Kardono, M.Sc. Melalui beranda ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Priyadi. Kami percaya bahwa pemimpin yang jujur, bebas konflik, dan adil yang selalu dipegang pimpinan BIG, akan diteruskan oleh profesor ilmu geodesi ini, khususnya dalam mendukung program penyelenggaraan IG.

Figur Prof. Dr. Hasanuddin sudah

tidak asing lagi bagi kalangan survei dan pemetaan dan juga BIG. Semoga di bawah kepemimpinan beliau BIG secara umum makin maju dan profesional dalam pelayanan publik terkait penyediaan informasi geospasial, baik IG dasar, IG tematik maupun pembangunan infrastruktur IG untuk berbagai segi kehidupan dan pembangunan nasional. Kami PPTRA juga akan semakin terpacu menjadi lebih baik dalam menyusun program dan melaporkannya dalam Newsletter ini.

Khusus program pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas, dukungan pimpinan sangat penting untuk menciptakan optimalisasi produk dan kreativitas program. Program pemanfaatan IG, kebijakan dan pembinaan IGT serta pemetaan detail tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas akan terus menjadi kegiatan utama PPTRA.



Foto Bersama

Dalam rapat monitoring bulan November yang dipimpin oleh Deputy IGT Dr. Nurwadjadi, pencapaian program PPTRA sekitar 74% untuk penyerapan anggaran sekitar 85% untuk capaian fisik kegiatan. Diprediksi PPTRA akan mencapai penyerapan anggaran sekitar 95% pada akhir Desember 2016 dan capaian fisik 100%. Semoga hasil-hasil program PPTRA bermanfaat untuk publik. [Desember 2016]

Rekomendasi Peta Tata Ruang



Penyerahan Surat Rekomendasi

Belum lagi hilang euforia tahun baru dan kesibukan menyiapkan dokumen kerja 2017, beberapa daerah sudah mengajukan permohonan rapat pleno pemberian rekomendasi peta tata ruang ke PPTRA. Rapat Pleno adalah rangkaian akhir proses asistensi

tata ruang setelah asistensi teknis selesai dilakukan. Rapat ini berupa sidang terbuka pembahasan peta tata ruang yang umumnya dihadiri pimpinan daerah (sekda/wakil bupati) atau pimpinan SKPD (kepala dinas). Seluruh data direview ulang meliputi aspek geometris, tematis, dan konsistensi dengan dokumen rancangan peraturan daerah. Pimpinan daerah dapat mengetahui kualitas peta tata ruang wilayah mereka. Selesai rapat pleno, BIG mengeluarkan surat rekomendasi yang ditandatangani Kepala PPTRA sesuai peraturan Kepala BIG No 6 tahun 2014 tentang tata cara konsultasi penyusunan peta rencana tata ruang.

Setelah permintaan rapat pleno yang intensif di awal tahun, permohonan asistensi pun sudah mulai berdatangan. Seiring penempatan ruang baru, kegiatan asistensi peta tata ruang diharapkan dapat ditingkatkan frekuensinya.

Selama tahun 2016, ada sekitar 1400 pertemuan dengan pemerintah daerah, artinya setiap harinya tim asistensi menerima 5-6 daerah. Banyaknya pertemuan diakui belum sebanding dengan banyaknya surat rekomendasi yang dikeluarkan. Pada tahun 2016, BIG hanya mengeluarkan rekomendasi untuk 66 peta tata ruang, 52 di antaranya untuk peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan RTRW provinsi, serta Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Tentunya ini menjadi pekerjaan rumah BIG, khususnya PPTRA dan pemerintah daerah

untuk mempercepat dan memperbanyak penyelesaian peta tata ruang.

Selain kesibukan di bidang tata ruang, PPTRA juga disibukkan dengan penyelesaian program lain, yaitu integrasi dinamika sumberdaya, serta atlas dan pemetaan sosial. Beberapa program strategis yang masuk kategori prioritas nasional dan kegiatan nasional adalah tata ruang perbatasan, tata ruang pedesaan, integrasi neraca sumberdaya alam serta atlas sosial. [Januari-Februari 2017]

Silih Berganti Program Prioritas



Silih berganti program prioritas terjadi pada pusat teknis di BIG, tidak terkecuali program Pemetaan Tata Ruang dan Atlas. Di PPTRA terjadi peningkatan program Prioritas Nasional (PN) menjadi 3, serta adanya tambahan program Kebijakan Satu Peta (KSP). Program prioritas penganggarannya terjamin karena sesuai kebijakan pemerintah *money follow* program. Beberapa kegiatan, meski tidak terkait PN dan KSP namun dianggap penting mendukung tugas fungsi organisasi, maka tetap dianggarkan.

Tiga kegiatan prioritas nasional tersebut yaitu NSPK Pemetaan Tata Ruang Desa,

Integrasi RTRW dan RZWP3K dan Pemetaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perbatasan. Ada yang menarik, meski tidak masuk dalam program KSP, tetapi keterlibatan PTRRA dalam program KSP boleh disebut *extra ordinary*. Hal ini karena implementasi program KSP berujung pada penataan ruang yang lebih baik. Selama uji petik program KSP 2016 di Kalimantan, ditemukan masalah utama implementasi program KSP adalah pada Informasi Geospasial (IG) tata ruang. Sehingga PTRRA diminta membantu mengawal implementasi program KSP tersebut.



Wilayah Perbatasan

Selain tiga PN, terdapat beberapa program sesuai tugas dan fungsi PTRAs yaitu: Pemetaan Dinamika Sumberdaya, Atlas dan Pemetaan Sosial serta Asistensi Percepatan Tata Ruang. Motivasi kami dalam bekerja adalah kami membangun sesuatu yang kami banggakan dan berguna bagi masyarakat. Bill Gates berkata bahwa “teknologi informasi dan bisnis saling terjalin dan erat. Siapapun tak dapat berbicara salah satunya dengan penuh makna tanpa membicarakan satu sama lainnya”. Karenanya, tak salah jika kita berharap agar semua produk IG yang dihasilkan dapat menggerakkan bisnis di

masyarakat. Bila tidak, berarti ada yang salah dalam tata laksana penyelenggaraan IG dan itu perlu segera diperbaiki.

Newsletter ini adalah sarana komunikasi kami dengan masyarakat luar. Pembaca adalah sahabat baik yang menginspirasi materi Newsletter ini. Apapun penilaian pembaca selalu berarti bagi kami untuk memperbaiki tampilan dan isi. Sebagaimana seorang alim berkata, mencari teman baik itu susah, tapi melepaskannya sangat mudah. [Maret 2017]

Saatnya Belajar Menjadi Profesional

Saatnya belajar menjadi profesional. Sepertinya kalimat itu tepat sebagai moto untuk meningkatkan kinerja PTRAs di tahun 2017. Salah satu sikap profesional yang harus dipelajari adalah komunikasi program, yaitu bagaimana menjelaskan dan menyebarluaskan produk pemetaan tata ruang, pemetaan dinamika sumberdaya, atlas dan pemetaan sosial kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait baik kalangan internal BIG ataupun kementerian, lembaga, organisasi, dan pemerintah daerah (KNOP).

Sikap profesional lain adalah dalam hal optimalisasi penyerapan. Realisasi penyerapan anggaran selalu lebih kecil dari realisasi fisik. Dalam batas tertentu adanya gap ini wajar hanya bila selisih cukup besar terkesan kegiatan bisa berjalan tanpa anggaran. Hal tersebut tidak boleh terjadi.

Memasuki triwulan kedua tahun 2017, bersama PPK IGT kami sepakat untuk optimalisasi penyerapan dengan membuat rencana anggaran kegiatan tiap bulan setiap tanggal 16 diajukan ke PPK untuk kegiatan bulan berikutnya.

Alhamdulillah uji coba sistem dapat memuaskan semua bidang, hampir semua kegiatan di PTRA di periode Maret sampai dengan April 2017 terdani tanpa penggunaan uang pribadi koordinator kegiatan. Penganggaran melalui skenario uang persediaan (UP) dan lumpsom (LS) untuk perjalanan dinas luar kota atau ganti uang (GU). Pengecualian diberikan untuk tugas mendadak dari pimpinan bisa pakai UP. Dalam hal kebutuhan melebihi persediaan maka diupayakan fasilitas tambahan uang persediaan (TUP).

Terbukti beberapa kegiatan dilaksanakan tanpa uang pribadi seperti pleno rekomendasi peta tata ruang sudah 18 kali, pembinaan neraca sumber daya alam kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada untuk staf pemda Provinsi Jawa Timur, dan beberapa survei teknis pengukuran GCP. Inilah momen tepat kami bangkit dan belajar menjadi profesional agar dapat menjalankan tugas dan fungsi menjadi lebih baik. Semua terlaporkan dalam Newsletter bulan April ini. [April 2017]

Suara Presiden untuk Jajaran Pemerintah Pusat dan Daerah

Presiden Jokowi memberikan kritikan kepada jajaran pemerintah pusat dan daerah perihal perencanaan anggaran yang kurang fokus dan tidak memiliki program prioritas yang jelas. Presiden juga menilai program prioritas tidak perlu terlalu banyak, antara 3-5 sudah cukup. Kritik tersebut disampaikan saat membuka Musrenbangnas 2017 di Jakarta, Rabu (26/4) yang dihadiri sejumlah menteri kabinet, gubernur, bupati, dan walikota seluruh Indonesia. Kritik presiden terasa tepat di saat hampir semua K/L dan pemda menyusun program dan membahas pagu indikatif 2018.

Menanggapi himbauan presiden dan arahan pada rapat pimpinan BIG, PPTRA memang sedang memilah-milah lagi program prioritas yang harus tetap berjalan dan masih bisa ditunda. Dari seluruh program yang ada di tahun 2017, PPTRA mempunyai tiga program Prioritas Nasional (PN) yaitu pemetaan RDTR wilayah perbatasan, RTRW dan RZWP3K, dan penyusunan pedoman pemetaan desa. Selain PN tersebut PPTRA masih mempunyai Prioritas Bidang (PB) yaitu mendukung percepatan tata ruang

melalui pemberian asistensi peta tata ruang, pemetaan aktual tema sebaran industri, serta integrasi neraca sumberdaya alam. Prioritas bidang berfokus pada penguatan infrastruktur pendukung percepatan pemetaan dan pemetaan sosial. Tidak kalah penting adalah dukungan atas Perpres 6/2016 tentang Kebijakan Satu Peta (KSP) terkait penyediaan informasi yang berkualitas atas data tata ruang.

Memasuki bulan Mei progres penyerapan PPTRA sekitar 5,7% lebih besar dari bulan sebelumnya yang hanya 3,6% atau ada kenaikan sekitar 2,1%. Hal ini dikarenakan adanya penarikan uang muka dari beberapa penyedia jasa. Nilai 5,7% ini sebenarnya masih jauh lebih kecil dari rencana yang dibuat sekitar 10,5%, karena mundurnya penanda tangan kontrak dari beberapa pekerjaan. Memasuki bulan Ramadhan 2017 yang aurnya sudah terasa, kami berharap penyelesaian pekerjaan akan semakin mudah dan efisien. Berbagai kesulitan pekerjaan adalah hal yang pasti. Namun demikian, kami akan tetap berusaha menyelesaikan apa yang sudah kami susun dan rencanakan sebelumnya. Selamat membaca aktivitas di PPTRA. [Mei 2017]

Kekhusyukan Ramadhan dan Peta Mudik

Di tengah kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadhan, PPTRA menerima tugas tambahan dari pimpinan berupa pembuatan peta mudik sekaligus kritikan dalam proses asistensi peta tata ruang.

Tugas tambahan membuat peta mudik boleh dibilang berat tapi menantang. Waktu dan desain *layout* menjadi kendala. *Alhamdulillah* berkat semangat tim kreatif PPTRA dan bekerjasama dengan ITENAS Bandung, produk cetak jalur mudik bisa diselesaikan tepat waktu dan sudah disebarakan ke masyarakat sebelum H-10 jelang Idul Fitri dan data bisa diunduh di situs web BIG www.big.go.id.

Terkait kritikan lambatnya proses asistensi, PPTRA diminta bagaimana melakukan percepatan pemberian rekomendasi peta tata ruang tanpa menabrak aturan perundangan yang berlaku. Asistensi peta tata ruang adalah amanah perundangan, suka tidak suka mesti kita ikuti. Asistensi dimaksud untuk menjamin penyediaan peta tata ruang yang akurat, *update*, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berangkat dari amanah pasal 14 UU No. 26 tahun 2017 tentang penataan ruang, diperlukan ketelitian peta tata ruang. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) 8/2013 tentang ketelitian peta tata ruang menetapkan bahwa peta tata ruang wajib divalidasi BIG.

Mekanisme validasi dan asistensi diatur dalam Perka No. 6 tahun 2014, sehingga bila ada proses yang tidak sesuai Perka maka tim teknis asistensi akan minta perbaikan sebelum rekomendasikan. Masalahnya menjadi serius manakala perbaikan tidak kunjung dilakukan oleh Pemda atau diperbaiki tetapi lama.

Sifat perbaikan adalah “mandiri” artinya Pemda selaku pemohon asistensi melakukan perbaikan sendiri. Setelah semua proses dilalui maka BIG melalui PPTRA mengeluarkan surat rekomendasi atas peta tata ruang yang dihasilkan. Lamanya proses perbaikan menuju rekomendasi inilah yang menjadi bahan kritikan. Kami paham, pemohon (Pemda) inginnya proses cepat tanpa perlu tahu berbagai kendala teknis. Oleh karena itu, kami akan terus berusaha mencari terobosan agar proses asistensi bisa cepat tanpa melanggar aturan yang ada. Bukan hanya aspek teknis tetapi juga kebijakan.

Beberapa kebijakan yang kami usulkan adalah mengenai revisi Perka BIG No. 6/2014 tentang ketelitian peta tata ruang dimaksudkan agar tingkat ketelitian peta tata ruang diturunkan dari yang saat ini dilakukan, penggunaan spot 6/7 dan drone pada wilayah yang tidak tersedia CSRT tersedia, termasuk pilihan revisi Permen PU tentang RDTR. Mudah-mudahan bulan Ramadhan melahirkan berkah atas kebijakan yang baik untuk mendukung percepatan peta tata ruang. [Juni 2017]



The Science Of Where - Pesatnya Teknologi GIS



Jack Dangermont saat pembukaan yang dihadiri 16.000 peserta

The science of where adalah frase kata baru yang kenalkan oleh Jack Dangermont, salah seorang CEO dari pengembang aplikasi GIS terbesar di dunia pada acara ESRI User Conference di Sandiago, USA pada 09-15 Juli 2017. Sebuah ungkapan kata singkat yang coba dikenalkan kepada masyarakat, tentang kumpulan karya berbasis data geografi yang telah dicapai menggunakan teknologi GIS (*Geographic Information System*) untuk membuka pemahaman keruangan. Sedikitnya ada 10 hal yang dikaitkan dengan GIS : mentransformasi pemahaman kita tentang dunia, pengetahuan tentang “dimana”, mengarahkan wawasan, memetakan sesuatu berbasis internet (WebGIS), memanfaatkan jaringan website dunia (www), analisis data satelit sebagai kecerdasan kasat mata (*visible intelligence*), fitur peta yang memuat cerita

(*story telling map*), pemetaan tiga dimensi, pemetaan individu dan komunitas, dan menyajikan kartografis atlas.

Luar biasa pesatnya perkembangan teknologi GIS, kecepatannya melebihi pemanfaatannya di lapangan. PPTRA berusaha menangkap berbagai peluang pemanfaatan GIS untuk menghasilkan IG tematik yang baik dan benar guna mendukung program pembangunan nasional. Dalam berbagai diskusi bersama awak media, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, dan Pemerintah Daerah yang salah satunya terlaksana di Bogor, pada Jumat 21 Juli 2017 tentang pemetaan tata ruang untuk *Smart City*. Pada Pertemuan tersebut kami sampaikan bahwa pengembangan kota apakah *Green City*, *Compact City*, *Cyber City Smart City*, termasuk pengembangan ibukota baru memerlukan dukungan data dasar dan peta dasar termasuk informasi geospasial tematik, khususnya tata ruang. Inilah yang menjadi tugas besar kami di PPTRA bagaimana menyiapkan IG tematik tata ruang, khususnya IG Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang baik dan benar tersedia untuk mendukung pengembangan kota yang lebih baik. [Juli 2017]



Utusan BIG dalam ESRI User Conference Sandiago 9-15 Juli 2017



Bulan Perjuangan dan Persoalan Tematis Nasional

Bulan Agustus ini boleh dibilang bulan spesial dan bulan perjuangan, bukan saja karena 72 tahun lalu bangsa Indonesia tengah berjuang merebut kemerdekaan, tetapi juga bertepatan dengan masuknya bulan suci Dzulhijah. Satu bulan dimana sebagian besar umat Islam berjuang menjalankan ibadah haji dan umroh serta menyembelih kurban. Oleh karena itu bekerja, berjuang, dan beramal baik sangat dianjurkan pada bulan ini.

Bercermin pada berbagai *reward* kebaikan pada bulan ini, bukanlah hal yang kebetulan bila kami di PPTRA merasa terjadi peningkatan berbagai aktivitas dari bulan sebelumnya. Terbukti penyerapan anggaran sebesar 35% sementara kemajuan fisik hampir menyentuh angka psikologis 50%, khususnya untuk kegiatan swakelola. Frekuensi kunjungan Pemda untuk asistensi peta tata ruang semakin meningkat, kami sudah melayani lebih dari 500 kunjungan atau sekitar 5-6 daerah/hari. Percepatan tetap kami lakukan tahun ini dengan mengintensifkan kembali kerjasama asistensi tata ruang dengan PPIDS ITB dan UGM yang diharapkan dapat mempercepat proses asistensi peta tata ruang. Demikian pula, kegiatan dalam menyiapkan produk tematik dan e-atlas terus dilakukan, termasuk persiapan uji keterbacaan peta taktual. Tidak kalah agresifnya adalah aktivitas penyiapan dokumen kebijakan, seperti dokumen kebijakan integrasi neraca sumberdaya alam, pemetaan tata ruang desa, dan penyajian atlas yang telah ditunggu banyak pihak.

Selain disibukkan peningkatan kinerja internal, kami juga terlibat dalam berbagai isu persoalan yang mempengaruhi kinerja

dan pembangunan nasional. Mulai pada skala global seperti isu perubahan iklim dan pemetaan global, maupun persoalan nasional berupa pemenuhan target program strategis yang telah ditetapkan seperti kebijakan satu peta, moratorium lahan gambut, RZWP3K ataupun program strategis dari PEMDA seperti penetapan Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Dalam konteks tersebut, pada akhirnya maka kami memandang persoalan yang terjadi diluar sana adalah lebih besar pada persoalan tematis atau ketersediaan Informasi Geospasial Tematik (IGT) daripada persoalan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Belajar dari pengalaman tersebut, kami melihat pemahaman informasi geospasial (IG) secara holistik dan integratif diperlukan sebagai pendekatan yang tepat dalam menjelaskan bisnis proses IG yang ada di BIG. Keterpaduan penyelenggaraan IGD dan IGT dalam merespon isu strategis, isu nasional, ataupun global diharapkan dapat menggambarkan peran BIG sesungguhnya dalam penyelenggaraan IG yang tidak hanya menjamin ketersediaan peta dasar tetapi berperan aktif dalam penyelenggaraan IGT yang baik dan benar. Untuk itulah kami di PPTRA berusaha mewujudkannya. [Agustus 2017]

Makna *Launching* Peta NKRI di Sabang



Peluncuran Peta NKRI 2017 di Titik Kilometer Nol, Sabang, Pulau Weh

Memasuki bulan September ini kami disibukkan dengan tiga kegiatan penunjang strategis yaitu peluncuran (*launching*) Peta NKRI di Kota Sabang, sosialisasi pemetaan tata ruang perdesaan di Kabupaten Tuban, dan Rakornas BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) di Jakarta. *Launching* Peta NKRI sangat strategis karena dihadiri oleh Kepala BIG Prof. Dr. Hasanuddin Z. Abidin dan Gubernur Provinsi Aceh Irwandi Yusuf sebagai deklarasi batas terbaru wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Demikian pula sosialisasi pemetaan tata ruang perdesaan di Desa Kesamben, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban dihadiri anggota DPR RI Komisi VII, Sementara Rakornas BKPRD di hadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN dan seluruh Sekretaris Daerah dari 34 Provinsi Indonesia.

Launching NKRI adalah implementasi kerjasama PPTRA dengan pusat lain di BIG dan Kementerian/Lembaga lainnya. Hasil ini kemudian disosialisasikan kepada pemerintah daerah, dunia pendidikan, swasta, dan publik sebagai bagian dari berbagai pakai produk atlas dan peta

kewilayahan, sekaligus mendukung Gerakan Menebar Satu Juta Peta. Sementara sosialisasi pemetaan tata ruang perdesaan dan Rakornas BKPRD adalah implementasi kerjasama kami dengan sektoral terkait pemanfaatan informasi geospasial tematik tata ruang.

Selain tiga kegiatan penunjang tersebut, bulan September ini kami juga disibukkan dengan kegiatan utama yaitu percepatan penyelesaian pemberian rekomendasi peta tata ruang, uji keterbacaan peta taktual, dan kajian pemanfaatan informasi geospasial tematik untuk pengembangan wilayah perbatasan dan kawasan ekonomi khusus (KEK). Di bulan September pula, dalam satu hari kami dapat mengadakan tiga (3) kali sidang pleno pemberian rekomendasi RDTR dan RTRW beberapa wilayah, sekaligus menerima kunjungan lebih dari 50 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

Serangkaian kegiatan tersebut memberi kami gambaran bahwa semakin intensif pemanfaatan informasi geospasial oleh masyarakat, sektoral dan pemerintah daerah maka semakin keras tuntutan bahwa kami perlu menciptakan konten tematik yang berkualitas atas produk peta tata ruang dan atlas.

Selain itu kelengkapan ketersediaan informasi tematik lainnya pun menjadi tuntutan yang mesti diperhatikan. *Last but not least* adalah percepatan program asistensi dan pemberian rekomendasi peta tata ruang. Sesibuk apapun kegiatan utama kami di PPTRA akan tetap terlibat dalam kegiatan

penunjang termasuk reformasi birokrasi dan olahraga dalam rangka peringatan Hari Informasi Geospasial, karena semua kegiatan tersebut bermanfaat. Pada sesuatu yang bermanfaat disitu kami pasti terlibat. [September 2017]

HIG ke 48 dan Rekomendasi Tata Ruang



Pembukaan Acara Hari Informasi Geospasial 2017

Setiap tahun, di bulan Oktober boleh dibilang bulan spesial BIG. Selain memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, bulan ini juga sebagai Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 48 tepatnya 17 Oktober yang cukup meriah diperingati dan dimaknai. Karenanya tepat bila semangat sumpah pemuda disandingkan dengan tema HIG tahun ini yaitu “**Kemandirian Geospasial untuk Kedaulatan Bangsa**” dan untuk itu diadakan acara pemberian penghargaan atas berbagai prestasi, produk dan inovasi teknologi bidang geospasial.

Diantara pemberian penghargaan adalah rekomendasi atas peta tata ruang wilayah yang dianggap sudah baik dan benar. Ada 7 wilayah yang mendapat rekomendasi pada peringatan HIG tersebut yaitu Provinsi Riau untuk RTRW provinsi, Kota Mataram dan Kota Padang untuk RTRW kota. Untuk RDTR diberikan kepada Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kota Surabaya, dan

Kabupaten Alor.

Peta tata ruang wajib divalidasi oleh BIG sesuai dengan PP 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang. Peta tata ruang 7 wilayah tersebut telah melalui asistensi dan bimbingan teknis pada aspek geometris ketelitian peta, aspek tematik peta rencana, aspek kartografis dan konsistensi antara peta rencana dan dokumen rancangan peraturan daerah (RaPerda).

Tema HIG sangat tepat untuk disosialisasikan. Pencanangan kemandirian geospasial berarti BIG harus memberi contoh kepada instansi pemerintah pusat dan daerah bagaimana infrastruktur geospasial nasional mesti direncanakan, dimanfaatkan dan dijadikan bahan pengendalian jalannya pembangunan. Untuk itu, Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) mesti dilengkapi dengan baik dan benar agar akurat, *update* dan dapat dipertanggungjawabkan.



Penyerahan Surat Rekomendasi
oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas kepada Pemerintah Daerah

Tugas berat menuju kemandirian geospasial tersebut tentu tidak hanya dipikul oleh satu keadepitian di BIG ataupun satu instansi pemerintah pusat tetapi merupakan tugas semua pihak. Kita boleh tidak sama tetapi kita wajib kerjasama. Mengerucut ke Pusat Pemetaan Tata ruang dan Atlas, kemandirian geospasial ditempuh melalui iterasi kegiatan dalam percepatan penyelesaian peta tata ruang melalui asistensi dengan bimbingan intensif, optimalisasi kajian spasial dinamis dari dampak pengembangan wilayah terhadap sektor ekonomi, sosial

dan lingkungan sekitar, serta pembangunan e-atlas dan pemetaan sosial.

Berbagai upaya dilaksanakan, termasuk penyiapan kebersihan dan kerapian ruang yang akhirnya berbuah penghargaan dari panitia HIG bahwa gedung F lantai 2 terpilih sebagai gedung terbersih. Luar biasa, ditengah usaha peningkatan aktivitas kegiatan akhir tahun, tim kreatif PPTRA masih menyempatkan diri menata ruangan sehingga bersih dan rapi. Selamat PPTRA dan terus berkarya. [Oktober 2017]

Menjaga Amanah PP No 8 Tahun 2013

Catatan beranda kali ini mengangkat penyajian informasi tata ruang dan atlas yang baik dan benar. Kesalahan penarikan garis batas atau penetapan kawasan dan zonasi dalam tata ruang yang tidak sesuai dengan data dasar, norma klasifikasi atau tidak memperhatikan kepentingan sektoral berdampak serius di lapangan. Konflik pemanfaatan lahan tidak jarang menimbulkan konflik sosial dan politik. Konflik umumnya berawal dari ketidakakuratan informasi geospasial yang digunakan.

Untuk itulah amanah PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang kami jalankan melalui serangkaian kegiatan asistensi dan bantuan teknis. Kami ingin tata ruang menjadi panglima pembangunan, sehingga peta rencana tata ruang yang akurat, *update*, dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dicapai. Strategi yang kami lakukan menimbulkan berbagai pertanyaan internal terkait tupoksi ataupun keinginan eksternal terkait asumsi bahwa keakuratan peta tata ruang hanya perlu peta dasar.

Perlu diketahui bahwa kegiatan asistensi BIG yang melahirkan rekomendasi untuk status tata ruang itu benar dan sesuai amanah Peraturan Pemerintah. Di sisi lain, rekomendasi BIG bukan satu-satunya dokumen rekomendasi yang menjadi kendala dalam percepatan ruang. Rekomendasi BIG adalah salah satu dari 14 dokumen yang diperlukan agar raperda tata ruang mendapat persetujuan Menteri Agraria Tata Ruang/BPN. Penyiapan 14 dokumen tersebut bukanlah perkara mudah dan perlu waktu seperti rekomendasi kawasan hutan atau ijin KLHS. Inilah konsekuensi yang kita ambil atas peta tata ruang yang benar.

Kami di PPTRA senantiasa berinisiatif dalam mendukung proses percepatan asistensi. Program percepatan asistensi peta tata ruang di daerah yang kami canangkan baru-baru ini mulai menunjukkan hasil. Dalam waktu satu bulan, kami dapat melakukan bantuan asistensi langsung kepada seluruh kabupaten di 4 provinsi yaitu Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, Papua Barat, dan Jawa Timur. Dapat dibayangkan bila 37 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, atau 27 kabupaten di Jawa Barat mengajukan permohonan asistensi peta tata ruang, maka kami harus mengalokasikan sekitar 30 hari

untuk melakukan asistensi. *Alhamdulillah* dengan program asistensi intensif di daerah, waktu asistensi dapat diefisienkan menjadi 2 hari dan seluruh kabupaten tersebut terlayani.

Selain disibukkan dengan *review* akhir proses asistensi tata ruang, kami berharap sampai akhir tahun 2017, seluruh 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota telah terlayani program asistensi. Potret seluruh kegiatan di bulan November pada PPTRA menunjukkan grafik peningkatan luar biasa. Bahkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran telah disusun harian sampai akhir tahun agar tercapai output kegiatan sesuai rencana.

Salah satu beban berat di bulan November adalah memeriksa hasil pekerjaan penyedia jasa yang umumnya telah memasuki babak akhir. Kami temukan beberapa penyedia jasa cukup baik dalam menyusun laporan akhir, ada pula beberapa yang terkesan sekadar menyajikan banyak data lapangan namun miskin menyajikan satu temuan penting dari kegiatan tersebut, termasuk tidak menghasilkan peta yang baik. Untuk itulah kami semua di PPTRA akan terus belajar dan bekerja sungguh-sungguh agar produk kami bermanfaat bagi banyak pihak. Mohon doa dan dukungannya. [November 2017]

Catatan Akhir Tahun untuk Kreativitas

Alhamdulillah, itulah ucapan yang keluar saat kami diminta menulis catatan beranda untuk Newsletter edisi Desember 2017, yang juga merupakan edisi akhir di tahun 2017. Tanpa terasa sudah lebih dari satu tahun Newsletter tata ruang dan atlas ini terbit, tepatnya sejak edisi pertama bulan September 2016. Sejak itu secara rutin dewan redaksi yang juga merupakan tim kreatif PPTRA mengemas berbagai kegiatan dari sekian banyak yang dapat ditampilkan pada Newsletter ini. Sampai akhirnya, awal Desember 2017,

semua edisi Newsletter ini terpublikasikan via laman BIG.

Tentu ada suka dan duka dalam mengelolala sebuah Newsletter, bahan berlimpah namun tetap diperlukan usaha untuk meramu menjadi tulisan yang singkat dan enak dibaca. Ternyata itu bukan pekerjaan yang mudah, kami masih perlu proses dan belajar bagaimana menata waktu sekaligus menjadi materi tulisan ringkas yang baik. Tetapi kami yakin dari berbagai kesulitan, pasti ada kemudahan.

Berbagai upaya telah kami lakukan, termasuk mengadakan kursus penulisan bagi tim redaksi dan *alhamdulillah* kegiatan ini sudah kami lakukan beberapa kali.

Patut disyukuri juga disela-sela menyiapkan terbitan Newsletter ini, sebagian tim redaksi juga melakukan melakukan asistensi dan supervisi peta tata ruang yang merupakan tupoksi kami. Bahkan tanpa sadar sampai bulan Desember 2017 tim teknis kami sudah melayani dan bertemu dengan pemerintah daerah sebanyak 2000 kali. Artinya bila dikaitkan dengan sosialisasi, maka asistensi peta tata ruang yang kami lakukan adalah sarana sangat efektif, efisien dan tepat sasaran dalam mengkampanyekan pemanfaatan informasi geospasial di daerah. Kita paham, tata ruang penting sebagai panglima pembangunan, mengawal peta tata ruang yang akurat, *update* dan dapat dipertanggungjawabkan substansinya merupakan pekerjaan mulia. Masyarakat menunggu peta tata ruang dan perlu waktu cepat. Oleh karena itu, sampai tahun 2019 percepatan asistensi dan penyusunan peta tata ruang tetap

merupakan program prioritas di PPTRA.

Tugas lain yang tidak kalah pentingnya adalah integrasi neraca sumberdaya alam terutama pada kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan dukungan atas kajian pengembangan wilayah pada wilayah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan pendekatan spasial dinamis. Kegiatan ini akan terus dilakukan sampai 2019 dan mengambil peran yang cukup penting, sejalan dengan permintaan Bappenas untuk menyusun buku III RPJMN 2019-2024.

Demikian pula pemetaan sosial, saat ini kami sudah menggandeng Kementerian Sosial untuk melakukan kerjasama dalam menyiapkan peta taktual atau peta khusus untuk para disabilitas (tuna netra) dan tentu saja pembangunan e-atlas yang diharapkan sudah mulai stabil dan tersosialisasikan di periode program 2018. Akhirul kalam selamat jalan tahun 2017 dan selamat datang 2018. Kami merasa belum banyak berbuat di tahun 2017 dan berharap akan terus berkarya di tahun 2018. *Insyallah. Ganbarimasu. [Desember 2017]*

Thinking Out of The Box

Memasuki awal tahun baru 2018 hampir seluruh staf PPTRA bahkan mungkin BIG, disibukkan dengan pengisian dan penilaian SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Banyak hal menarik dalam pengisian dan penilaian SKP. Salah satu peristiwa menarik terjadi dalam suatu sesi tanya jawab penyusunan SKP terkait kebijakan pembatasan kegiatan. Pertanyaan peserta rapat ***"apakah keuntungannya bila kita melakukan kebijakan pembatasan sementara kebijakan umum membolehkan?"***. Respon narasumber mengejutkan, mereka sudah capek atas berbagai ketidaktepatan yang

ada yang penting jadi dan sasaran tujuan tercapai. Capek menyikapi waktu adalah sesuatu yang sangat serius apalagi bagi pimpinan.

Waktu adalah sesuatu yang terus bergerak. Ia akan terus bergerak melangkah ke depan walau kita merasa lelah mengikutinya. Kita boleh merasa kecewa ketika harus melalui kehidupan yang tidak menyenangkan tapi inilah realita kehidupan. Marah dan capek yang berkepanjangan tidak akan merubah sesuatu yang telah dibangun dengan tangan sendiri.



Alkisah seorang tukang kayu kerajaan yang biasa kerja teliti dan bagus, sehingga karyanya menjadi terkenal. Suatu saat ia merasa lelah dan ingin berhenti jadi tukang kayu. Lalu ia mengutarakan keinginan tersebut kepada raja yang selama ini mempekerjakannya dengan harapan mendapat sedikit bekal dari sang raja. Tetapi bukannya diberi pesangon, raja tersebut malah memerintahkan dia untuk membuatkan sebuah rumah sebagai persyaratan sebelum berhenti. Merasa kecewa, tukang kayu itu menerima pekerjaan tersebut dan melampirkan pada pekerjaannya. Ia bekerja seadanya dan tergesa-gesa, ceroboh, dan dari bahan seadanya yang penting jadi atau asal jadi.

Sebuah rumah sederhana yang dikerjakan sekadarnya akhirnya selesai. Tanpa disangka, sang raja ternyata memberikan kunci rumah tersebut kepada sang tukang kayu sebagai hadiah atas dedikasinya yang baik selama ini. Akhirnya tukang kayu hanya bisa menyesali rumah asal jadi yang dikerjakannya sendiri. Demikian pula dengan kita, rumah adalah

ibarat program. Dalam menjalankan program terkadang kita lupa bahwa kita sendirilah yang membuat program tak tercapai.

Memasuki tahun 2018, PPTRA telah memilih beberapa staf yang dipandang teladan dan terbaik, yaitu Fuad Hasyim, Roswidyatmoko Dwihatmojo, dan Fakhruddin Mustofa. Dari mereka bertigalah kita semua staf PPTRA harus bertigalah kita semua staf PPTRA harus banyak belajar, KREATIF, PRODUKTIF, DAN *THINKING OUT OF THE BOX*. Mari kita kembali pada kehidupan normal kita yang keras dan penuh tantangan. Ketika segalanya berubah menjadi mudah dan tanpa tantangan, kita mesti introspeksi barangkali program kita akan menjadi tidak terkendali. Mumpung masih di awal tahun, kita masih diberi waktu untuk mengubah rumah masa depan kita, kita masih diberi waktu untuk memperindah setiap sudut rumah kita. *Bismillahirrohmanirrohim.....*
Ayo Semangat menyusun rumah baru!
[Januari 2018]

Geospasial dan Politik

Selama hampir satu minggu di bulan Februari, PPTRA mendampingi anggota DPR RI Komisi VII di dua wilayah. Pertama ke Provinsi Sumatera Barat terkait isu energi kelistrikan, sumberdaya mineral, lingkungan hidup dan riset teknologi. Kunjungan berikutnya ke Kabupaten Banyumas dalam rangka diseminasi pemanfaatan informasi geospasial untuk penataan ruang pedesaan dan batas wilayah. Selalu ada hal baru yang kami dapat dalam pendampingan kunjungan kerja anggota dewan. Hal ini menunjukkan betapa data dan informasi geospasial di sektor hulu semakin menunjukkan perannya. Kasus rasio elektrifikasi di Sumatera Barat menyisakan pertanyaan, dari mana asal bahan baku batubara, apakah didukung jalur transportasi dan pelabuhan sebagai penghubung sehingga efisiensi biaya tercapai? Demikian pula konflik batas desa dan persil tanah di wilayah Kabupaten Banyumas akibat adanya perubahan aliran sungai. Masalah-masalah tersebut membutuhkan kepastian data dan informasi geospasial.

Pendampingan kunjungan anggota DPR menunjukkan bahwa BIG sebagai mitra DPR dalam rangka misi “Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik” melalui pemanfaatan informasi geospasial. Kedekatan secara ilmiah dengan anggota DPR menjadi penting, karena apapun hasil kegiatan teknis tidak lepas dari aspek politis.

Penyusunan tata ruang misalnya, secara umum terdiri atas tiga proses mulai dari proses teknokratis berupa pengkajian dokumen pelengkap dan teknis penyusunan, proses politis, dan proses sosial berupa konsultasi publik. Perkara yang paling sulit

terkadang justru pada aspek politisnya. Oleh karena itu, tanpa diminta pun kami siap mendukung aktivitas DPR secara teknis karena lembaga ini mewakili rakyat.

Beberapa hasil lain tetap diraih seperti pemberian rekomendasi. Awal 2018, kami telah mengeluarkan rekomendasi 11 daerah, artinya hampir tiap minggu kami mengeluarkan rekomendasi peta tata ruang untuk daerah. Sesuai PP Nomor 3/2013 penyusunan peta tata ruang wajib divalidasi oleh BIG. Meski hal ini terkadang menimbulkan salah persepsi di sebagian orang atau sektor yang menganggap BIG berperan terlalu jauh dalam hal penyusunan tata ruang. Padahal yang kami lakukan adalah melakukan pengawalan pada saat penyusunan peta rencana tata ruang agar baik dan benar. Isu lain adalah kegiatan spasial dinamis yang membawa tim teknis spasial dinamis bertemu dengan tim ADB membicarakan kemungkinan bantuan penyusunan pemetaan dinamika spasial sebagai masukan RPJMN 2020-2024.

Demikianlah, *Alhamdulillah* selama bulan Februari 2018, bulan dengan jumlah hari paling sedikit namun terisi banyak kegiatan. Biarlah kami berusaha dengan hati senang menuliskan berbagai potret kegiatan. Kami berharap anda pun dapat membaca dengan senang pula sehingga tercipta komunikasi dua arah antara kami dan anda. **[Februari 2018]**

Rakornas Informasi Geospasial “Show Up BIG”



Dalam acara pembukaan Rakornas Informasi Geospasial, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyinggung tentang kendala penyelesaian tata ruang akibat kelangkaan peta dasar skala besar. Menurutnya, hanya 40 RDTR yang sudah selesai (sudah terbit Perda) dari total sekitar 1.800 RDTR yang disusun pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini sebenarnya diluar ranah BIG karena penyelesaian perda terkait unsur politis dan sosial. Sebagai contoh, di Provinsi Jawa Tengah, belum satupun perda diterbitkan meskipun sudah lebih dari 20 peta RDTR telah mendapatkan rekomendasi BIG. Peraturan gubernur tentang RDTR yang belum keluar karena belum adanya persetujuan anggota DPRD. Demikian pula di Provinsi Jawa Timur, BIG sudah merekomendasikan sekitar 60 peta RDTR, namun baru 23 Perda yang selesai. Jadi, terbitnya Perda RDTR bukan hanya terkait masalah perpetaan namun juga terkait pada proses penyelesaian Perda di level provinsi. Ketersediaan CSRT (Citra Satelit Resolusi Tinggi) untuk beberapa wilayah

dapat dijadikan modal untuk penyelesaian peta RDTR. Saat ini, sekitar 750 peta RDTR sedang dalam proses asistensi di BIG dan kemungkinan akan segera dipercepat proses rekomendasinya.

Perlu dipahami bahwa surat rekomendasi BIG hanyalah satu dari sekitar 14 persyaratan untuk proses persetujuan substansi Kementerian ATR/BPN. Meskipun demikian, BIG secara institusional harus memperhatikan lambatnya penyelesaian perda tata ruang tersebut. Jika Perda tidak segera disahkan, maka dinamika perkembangan wilayah akan mempengaruhi perubahan batas deliniasi pola ruang dan struktur ruang yang ada. Oleh karena itu, program percepatan penyelesaian rekomendasi peta tata ruang oleh BIG tetap harus dilakukan. Penyediaan peta dasar dan informasi geospasial dasar serta pengawasan peta tematik dan aspek kartografis pada album peta menjadi langkah riil untuk menjamin produk peta tata ruang yang baik dan benar serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kami tidak terpengaruh jika sementara ada pihak yang memandang lambat nya Perda tata ruang terkait dengan masalah konsultasi perpetaan. Bahkan, muncul penafsiran bahwa konsultasi tata ruang ke BIG hanya untuk menanyakan status peta dasar sehingga berita acara penyerahan peta dasar saja sudah cukup sebagai bukti bahwa tata ruang sudah konsultasi ke BIG. Padahal, merujuk amanah PP 8/2013

tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, semua hal terkait pemetaan tata ruang wajib dikonsultasikan ke BIG. Apabila hanya berbekal berita acara penyerahan peta dasar saja, menandakan mereka tidak paham akan kaidah dan peran peta dalam penyusunan tata ruang. Hal ini harusnya yang dipahami oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota. [Maret 2018]

Isu Sertifikasi dan Gagal Lelang

S elaku PPK baru sekaligus merangkap kepala pusat yang mengurus teknis, isu sertifikasi kompetensi dan revisi mulai terlihat sangat mempengaruhi kegiatan, terutama untuk pekerjaan penyedia jasa konsultasi yang tanda tangan kontraknya sudah dimulai bulan april ini. Penandatanganan kontrak di bulan april boleh dibilang cukup riskan, terlebih untuk pekerjaan yang memerlukan waktu panjang lebih dari 8 bulan sangat tidak dimungkinkan. Lambatnya penandatanganan kontrak tahun ini tentunya berdampak pada mundurnya pekerjaan teknis. Keterlambatan ini salah satunya disebabkan oleh lambat nya pelelangan karena isu sertifikasi tenaga penyedia jasa tersebut. Beberapa kegiatan bahkan ada yang sampai empat kali lelang ulang karena tidak ada satupun penyedia jasa yang memenuhi persyaratan kompetensi.

Terhitung awal tahun 2018 kebijakan BIG menetapkan bahwa setiap pekerjaan jasa konsultasi, harus memiliki sertifikasi keahlian informasi geospasial (IG) meliputi penginderaan jauh, GIS, fotogrametri, survei terestris, kartografi, hidrografi, dan ahli kewilayahan. Seperti diketahui penyedia jasa yang selama ini melakukan pekerjaan di BIG, sebagian besar tidak bersertifikasi IG. Hal ini karena pada saat itu sertifikasi

IG masih terus di proses dan menuju ke arah yang lebih baik dan belum diberlakukan tahun tahun sebelumnya. Seperti dilema buah simalakama, membiarkan pekerjaan jasa konsultasi tanpa sertifikasi kompetensi sama saja membeli kucing dalam karung. Sementara mewajibkan penyedia jasa bersertifikasi IG akan mengakibatkan banyaknya kontrak yang gagal. Kami memilih opsi ke dua, perlu sertifikasi walaupun harus menanggung akibat mundurnya kegiatan.

Sertifikasi itu penting untuk menjamin kualitas produk, tetapi tidak jauh lebih penting dari kewajiban menyelesaikan program yang ada. Oleh karena itu, penerapan sertifikasi kami usulkan diterapkan secara bertahap. Selain isu sertifikasi, lambannya proses revisi DIPA menjadi kendala lambat nya penandatanganan kontrak. Tampak pemerintah sangat berhati hati dalam menerima revisi DIPA, padahal realitas di lapangan banyak pekerjaan yang memerlukan penyesuaian. Seharusnya semangat debirokrasi dan deregulasi tidak menyebabkan pengetatan revisi DIPA. Semoga tahun mendatang kebijakan sertifikasi dan revisi DIPA bisa lebih baik dari tahun ini. Selamat memasuki dunia kompetensi dan sertifikasi. [April 2018]

Revolusi Industri 4.0 Bidang Informasi Geospasial



Alvin Toffler membagi perkembangan peradaban manusia menjadi tiga gelombang yakni gelombang masyarakat agraris, gelombang masyarakat industri, dan gelombang masyarakat informasi. Saat ini ada yang mengistilahkan masyarakat dunia tengah memasuki gelombang industri informasi, sebagai gelombang generasi keempat. Gelombang baru ini mulai banyak disebut sebagai gelombang revolusi industri 4.0, gaungnya semakin nyaring terdengar di Indonesia.

Konsep revolusi industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab. Ekonom asal Jerman itu menulis dalam bukunya, *The Fourth Industrial Revolution* bahwa konsep itu telah mengubah hidup dan kerja manusia. Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan era digitalisasi dan internet. Zaman yang ditandai dengan sistem *cloud computing*, *cyber*, virtual, big data, konektivitas manusia, mesin dan data, semua data ada di mana-mana dan bisa diakses siapa saja.

Kata kuncinya ada dua, yakni *near future* yaitu perubahan bukan dalam waktu lama melainkan hitungan bulan. Kedua adalah ekosistem yang ujungnya bisa mengubah perilaku seseorang. Jika alih teknologi industri pada masa lalu memerlukan puluhan hingga ratusan tahun

untuk menjadi budaya atau mempengaruhi perkembangan masyarakat, pada era serba internet dan jaringan ini hanya memerlukan beberapa detik. Perubahan di belahan dunia manapun secepat bisa langsung berpengaruh ke Indonesia.

Demikian pula yang terjadi pada dunia informasi geospasial, khususnya pada teknologi pemetaan tata ruang dan atlas. Kebijakan pimpinan bahwa setiap ASN wajib mempunyai minimal 20 jam aktivitas peningkatan kapasitas SDM sangat pas dengan keinginan kami untuk beradaptasi dengan berbagai teknologi dan kemajuan yang ada. Beberapa tugas yang cukup menantang sebagai bagian dari cara kami memanfaatkan kemajuan internet salah satunya adalah penyediaan fasilitas Rekomendasi *online*.

Pemberian rekomendasi merupakan tugas yang kami emban sebagai implementasi PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Tata Ruang. Terdapat kurang lebih 1800 RDTR, 34 RTRW provinsi dan 514 RTRW Kabupaten dan Kota yang saat ini tengah disusun dan diusulkan oleh daerah. Tentunya ini menjadi amanah yang harus kami jalankan secara cepat tetapi juga tidak mengabaikan keakuratan. *Alhamdulillah* sejak Januari sampai Mei 2018, kami sudah memberi rekomendasi peta tata ruang sebanyak 46 peta. Jumlah ini tentu belum signifikan terhadap total peta tata ruang yang harus kami validasi. Oleh karena itu, salah satu perubahan cepat adalah menyiapkan sistem rekomendasi *online*. Pajak *online* merupakan contoh yang patut ditiru untuk penyusunan rekomendasi tata ruang *online*.

Pajak online merupakan contoh yang patut ditiru untuk penyusunan rekomendasi tata ruang online. Dalam konteks ini, daerah dapat *upload* pekerjaan penyusunan peta tata ruang mereka dengan data dukung yang cukup, selanjutnya mesin secara otomatis akan melakukan verifikasi cepat untuk menentukan apakah peta mereka layak mendapat rekomendasi BIG atau masih perlu asistensi.

Namun tugas pemerintah jangan hanya

Siapa Pengguna Produk Tematik

Dalam salah satu pembahasan *bilateral meeting* antara BIG dan Bappenas, kami ditanya siakah pengguna produk tematik ini ?. Pertanyaan seperti ini selalu berulang setiap kali kami mengusulkan program baru. Pemetaan tematik di BIG memang punya tugas yang tidak ringan, walau UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, khususnya pada Pasal 23-24, menyebut peran BIG dalam penyediaan peta tematik, namun dalam prakteknya kami kesulitan merumuskan program terkait istilah integrasi tematik, tematik baru yang tidak dikerjakan K/L, dan pembinaan. Strategi umum kami dalam merumuskan program adalah berkoordinasi dengan sektoral/ pemda atau mitra pembangunan dalam mewujudkan program pembangunan yaitu penyelenggaraan informasi geospasial tematik. Selain itu kami pun sibuk berinovasi dengan program tematik dengan melihat isu nasional dan dunia seperti isu SDGs (*Sustainable Development Goals*). Untuk semua itu, pada akhirnya memaksa kami berinteraksi dengan banyak pihak dan kami fokus menghasilkan IGT yang baik dan benar.

Masalahnya semua kepentingan tersebut tersebar di berbagai direktorat di Bappenas, dan atau sektoral yang berada berbeda direktorat BIG di Bappenas. Sehingga

mengandalkan industri 4.0, melainkan juga menyiapkan langkah-langkah antisipasi atas berbagai dampak yang akan terjadi. Untuk itu saat ini kami tengah menjajaki kerjasama dengan BPPT dalam teknologi pengamanan data digital. Akhirnya, dengan mengucap *bismillahirrohmanirrohim*, kami akan terus berinovasi dan menyiapkan SDM unggul, salah satunya dalam dunia literasi dan tulis menulis. [Mei 2018]

kami tidak sempat berpikir siapa yang akan memanfaatkan produk IGT kami. Salah satu kreativitas dan inovasi kami adalah pembuatan Atlas Jalur Mudik. Kami memandang mudik sebagai fenomena yang unik buat masyarakat Indonesia. Berbagai program diluncurkan pemerintah untuk mendukung tersebut, mulai dari perbaikan infrastruktur sampai penyediaan peta mudik.

Peta mudik yang banyak beredar dimasyarakat sudah cukup menarik, karena ditampilkan dengan dukungan infografis yang baik. Hanya kekurangan pada peta mudik tersebut yaitu mengabaikan aspek kartografis dan pemetaan yang benar. Oleh karena itu, salah satu inisiatif kami membuat peta jalur mudik yang benar dengan tidak mengabaikan aspek keakurasian informasi. Atlas ini memberi gambaran jalur transportasi yang dapat digunakan para pemudik baik berkendaraan roda empat atau roda dua, termasuk jalan-jalan alternatif.

Ikhtiar kami ini karena sebagai instansi pemerintah, kami diminta atau tidak, maka wajib mendukung kebutuhan masyarakat. Selain itu dalam jangka panjang, inisiasi ini sebagai langkah awal terbangunnya *database* terpadu sistem transportasi darat dan laut Indonesia.

Sistem tersebut mengintegrasikan semua data jalan, dan beberapa tema yang ada pada sektor terkait. Oleh karena itulah, kami kadang kesulitan saat ditanya siapa pengguna peta tematik ini?. Hal ini karena seringkali kami berpikir bagaimana menghasilkan produk yang diterima masyarakat sehingga tidak terpikir siapa pengguna data kami.

Kami berharap pada level koordinasi

yang lebih tinggi, kami diinformasikan tentang penggunaan data yang kami hasilkan. *Allhamdulillah* selepas Ramadhan 1439 H ini kami masih bisa terus berkarya dan menampilkan potret kegiatan ini dalam Newsletter. Semoga Ramadhan memberi kami banyak pelajaran untuk bekerja lebih baik, lebih jujur dan lebih utama mencapai ketakwaan. [Juni 2018]

Sulitnya Menerapkan Aturan Hukum Informasi Geospasial

Bukan perkara mudah untuk menerapkan peraturan yang ada meskipun payung hukumnya jelas. Hal ini karena masyarakat sudah terbentuk oleh kebiasaan lama. Contohnya dalam hal asistensi dan validasi peta tata ruang oleh BIG. Sebelum terbitnya UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2013 tentang ketelitian peta tata ruang. Penyusunan tata ruang dilakukan tanpa memperhatikan keakurasian peta tata ruangnya sebagai lampiran rancangan peraturan daerah (perda). Akibatnya peta tata ruang yang dihasilkan kurang baik dan benar serta kesulitan pada saat peninjauan kembali karena datanya tidak bisa di edit. Lalu terbitlah dua peraturan tersebut di atas. Lewat peraturan tersebut, daerah wajib melakukan konsultasi peta tata ruangnya sebelum mendapat persetujuan dari Kementerian ATR/BPN.

Sampai bulan Juli 2018 tercatat sudah 950 peta tata ruang daerah dikonsultasikan ke BIG. Namun demikian terdapat pula upaya dari beberapa pihak untuk mengecilkan arti penting pemeriksaan peta tata ruang oleh BIG. Berbagai alasan diantaranya masalah peta dasar yang belum tersedia, lamanya waktu konsultasi, keterbatasan SDM dan sebagainya. Bahkan pengecilan

peran ini pun dibungkus dengan payung hukum yang dibuat seperti penetapan peta tata ruang tidak memerlukan citra satelit yang di koreksi geometrik atau proses orthorektifikasi. Padahal sudah jelas aturan UU mewajibkan penyusunan peta tata ruang menggunakan peta dasar. Pada skala besar, penyusunan peta tata ruang menggunakan citra satelit yang terkoreksi posisi 'XYZ' nya.

Bagi kami melakukan asistensi bukan sekedar memeriksa peta agar gambarnya indah sekali. Melainkan memberi jaminan atas aspek geometris, tematis, dan kartografis sesuai dengan standar perpetaan yang BIG kembangkan. Hal ini memang tantangan bagi kami di PPTRA dalam mendukung percepatan penyusunan tata ruang yang memperhatikan keakurasian data dan kebenaran atribut yang dapat dipertanggungjawabkan. Walau demikian kami juga mesti siap-siap percepatan peta tata ruang di era disrupsi ini. Sesuatu yang kami anggap berjalan normal boleh jadi berubah karena masuk teknologi, pergantian orang, perubahan metode, adanya peraturan baru dan kebijakan baru pimpinan. Upaya yang kami lakukan adalah menyiapkan *hard skill* staf, sehingga menjadi staf yang tangguh dan terampil, menyiapkan sistem *online* untuk proses rekomendasi dan memperkuat basis data tematik.

Demikian pula bagi program lain tentang dinamika sumberdaya dan pemetaan sosial pada prinsipnya sama, harus siap memasuki era disrupsi bila tidak ingin produknya ditinggalkan pengguna. Karena era disrupsi seperti menghadirkan masa depan di hari ini. Oleh karena itulah, PPTRA berupaya mendokumentasikan potret kegiatan dalam bentuk Newsletter yang dapat diunduh, sebuah bagian kecil dari era disrupsi. **[Juli 2018]**

Tanpa Inovasi, Newsletter Mati

Berbagai peristiwa penting terjadi tanah air di bulan Agustus dan dirayakan seluruh rakyat Indonesia. Sebut saja peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, Asian Games, Hari Raya Idul Qurban 1439 H, dan bulan haji. Selain semarak berbagai perayaan, bulan Agustus juga ditandai dengan peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat yang menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia, ratusan orang luka-luka dan ribuan mengalami kehilangan rumah tinggal. Oleh karena itu, mewakili unsur staf dan pimpinan di PPTRA serta redaksi Newsletter kami menyampaikan rasa duka dan bela sungkawa atas musibah bencana di NTB. Semoga masyarakat NTB bisa tabah dan kuat menghadapi semua dan proses rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan lancar.

Semarak perayaan dibulan Agustus ternyata tidak semarak kegiatan, terlihat dari angka penyerapan anggaran di PPTRA yang hanya naik 1% dari bulan sebelumnya. Alasan paling utama adalah adanya kelambatan dalam proses lelang dan penerapan sistem dan peraturan baru yang kurang diantisipasi dengan cepat oleh tim IT yang ada. Akibatnya beberapa kontrak yang gagal tidak dapat lagi dilakukan pengulangan, karena masalah waktu. Belum lagi adanya sisa kontrak yang tidak bisa digunakan karena terkait aturan bahwa sisa anggaran kontrak kegiatan prioritas

nasional (PN) hanya boleh digunakan untuk mendukung kegiatan PN, itupun memerlukan revisi DIPA dan pertemuan trilateral meeting dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Namun demikian apapun keadaannya, kita tetap bersyukur nikmat Allah SWT apapun pemberiannya. Memang sejak awal sudah harus diantisipasi akan adanya kelambatan dalam penyelenggaraan kegiatan. Ibarat organisasi bila tanpa inovasi maka akan mati. Demikian pula inovasi dalam kegiatan pemetaan tata ruang dan atlas, kegiatan percepatan penyelesaian peta tata ruang tetap dikejar tahun ini ditargetkan sekitar sedikitnya 200 peta tata ruang akan dikeluarkan rekomendasinya oleh BIG. Demikian pula proses bantuan dan bimbingan teknis. Kegiatan lain yang sudah berjalan seperti survei bentang lahan gunungapi dan dinamika spasial. Kami tetap optimis mentargetkan akhir anggaran penyerapan akan mencapai 90%. **[Agustus 2018]**

Istilah CSR Bidang Informasi Geospasial

Kenangan dan sejarah adalah bagian penting dari perjalanan sebuah organisasi bahkan sebuah bangsa. Hanya melalui sejarah, maka nilai positif masa lalu akan menjadi bagian pelajaran penting untuk kelangsungan hidup saat ini. Melalui sejarah pula kita bisa mengambil banyak pelajaran untuk proses kehidupan selanjutnya. Untuk itulah dalam setiap kegiatan, kami di PPTRA berupaya membuat sejarah atau kenangan yang baik, mempunyai nilai tambah dan berguna buat banyak pihak.

Alhamdulillah bulan September yang kebetulan bersamaan dengan bulan Muharam 1440 Hijriah banyak memberi berkah buat PPTRA. Bulan ini didalamnya terdapat anjuran berpuasa Assyura yang imbalannya menghapus keburukan kita satu tahun yang lalu. Pada bulan ini kami berkesempatan mengadakan beberapa acara yaitu kegiatan bimbingan teknis di Semarang berupa penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota di Jawa Tengah untuk percepatan penyusunan RPJMD, lalu bimbingan teknis percepatan pemetaan tata ruang bagi kabupaten di Medan, survei kegiatan pemetaan kemiskinan di Jawa Barat dan Banten, kegiatan FGD Sumberdaya Kegunungapian sekaligus koordinasi atlas audio bagi penyandang disabilitas di Yogyakarta, serta kegiatan pengembangan kapasitas SDM PPTRA di Bogor.

Bukan kelancaran kegiatan yang ingin saya tulis, tetapi aspek lain karena ini diluar perkiraan sebelumnya. Ternyata di sela-sela menghadiri salah satu acara di atas yang merupakan bagian dari kegiatan prioritas nasional (PN) dan prioritas bidang (PB), kami sempat pula mengadakan kegiatan

setipe/mirip CSR (*Corporate Social Responsibility*) walaupun sebenarnya istilah CSR tidak ada dalam kamus program kami di BIG. Ini pula bagian dari aktivitas tim kreatif PPTRA berupa peduli lingkungan dan peduli sosial. Acara tersebut berupa penerbaran 2500 ekor ikan di Sungai Cisadane, pembagian 134 paket sembako di Desa Caringin dan Cimande Hilir di Kabupaten Bogor. Pada kesempatan lain pula, kami meninjau lokasi pengolahan sampah di Pasar Niten, Kabupaten Bantul.

Meskipun kegiatan tersebut tidak terkait langsung dengan program kami di PPTRA, namun sesungguhnya kegiatan tersebut memuat pesan moral yang baik untuk kami dalam bekerja di BIG. Apalagi kegiatan pembagian sembako dan penaburan ikan dilakukan di lokasi kegiatan yang menjadi wilayah kegiatan pemetaan sosial untuk penanggulangan kemiskinan. Khusus PPTRA, kegiatan tersebut bisa juga dikaitkan sebagai bentuk kepedulian dari 3 bidang di PPTRA. Misalnya, peduli lingkungan mewakili aspirasi pedulinya bidang pemetaan Dinamika Sumberdaya, kepedulian sosial mewakili kepedulian bidang Atlas dan Pemetaan Sosial (APS), dan peninjauan lokasi pengelolaan sampah di pasar mewakili bidang Pemetaan Tata Ruang. **[September 2018]**

Gratifikasi dan Kerja Ikhlas



Penyerahan Penghargaan

Berbagai cara dilakukan organisasi saat merayakan ulang tahun hari kelahirannya. Demikian pula BIG pada 17 Oktober ini berulang tahun ke 49 sekaligus diperingati sebagai Hari Informasi Geospasial ke 7. Perayaan kali ini, khususnya PPTRA mengundang murid-murid SLB (Sekolah Luar Biasa) Kabupaten Bogor dan sekitarnya untuk mengenal NKRI dan dunia melalui atlas taktual kepada murid disabilitas netra. Selain membuat peta dasar dan tematik khusus untuk khalayak awas, BIG melalui PPTRA menghasilkan peta taktual atau peta timbul khusus untuk tuna netra dengan huruf braille dan objek timbul. Tak terhitung produk BIG untuk komunitas awas, tetapi peta taktual untuk penyandang disabilitas netra masih bisa dihitung dengan jari. Menurut UU No. 8/2016 penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan informasi yang mudah diakses termasuk informasi geospasial. Untuk itulah pengenalan NKRI dan dunia menjadi penting bukan sekadar mengajarkan mereka membaca tetapi juga mengenal posisi Indonesia di dunia, sehingga menjadi lebih cinta kepada tanah air.

Usia 49 tahun menurut skala umur manusia adalah masa usia separuh baya, yang tidak lagi muda tetapi belum terlalu tua

untuk berkarya bahkan puncak produktivitas bermula pada usia paruh baya ini. Oleh karena itu tepat sekali slogan HUT BIG kali ini, yaitu **SATU PETA, KERJA KITA, PRESTASI BANGSA**. Pesan Kepala BIG Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin, bahwa slogan tersebut tentu perlu dibuktikan. Selama ini BIG sudah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, oleh karena itu indeks prestasi instansi BIG seharusnya diukur pula dari seberapa banyak produk BIG yang bermanfaat bagi masyarakat banyak termasuk penyandang disabilitas.

Alhamdulillah patut disyukuri dihari ulang tahun ini, PPTRA menerima penghargaan dari Inspektorat sebagai pusat yang paling banyak melaporkan gratifikasi yang diterima. Sebuah kado indah buat semua staf di PPTRA, khususnya yang melakukan asistensi dan validasi peta tata ruang wilayah.

Sebagai bukti bahwa kami semua di PPTRA berupaya kerja keras juga tidak lupa niat ikhlas. Tugas berat tentu telah menanti kami di depan, meningkatkan jumlah rekomendasi peta tata ruang yang diperiksa, meningkatkan produk atlas dan pemetaan sosial serta kajian-kajian dinamika spasial. **[Oktober 2018]**

Invisible Power of Geospasial

Menarik membaca laporan penasehat ekonomi bisnis Alpha beta untuk google bahwa teknologi geospasial telah memberikan *service* dan menghasilkan keuntungan ekonomi harian kepada konsumen perorangan dan perusahaan yang nilainya mencapai ratusan triliun perhari. Teknologi satelit telah menghasilkan data dan informasi geospasial (IG) yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pribadi maupun bisnis seperti monitoring kebakaran hutan, memetakan bencana, perencanaan tata ruang, hingga pencarian jalur tercepat dalam pengiriman barang. Sehingga data dan informasi geospasial sudah menyatu dalam kehidupan keseharian setiap orang. Laporan tersebut tentunya menumbuhkan kebanggaan bagi kita yang selama ini bergerak dalam bidang IG, walaupun sangat sulit untuk menghitung secara kuantitatif dampak ekonomi IG akibat adanya kebijakan gratis untuk data geospasial atau kebijakan berbagi pakai data.

Ini mungkin yang disebut sebagai *invisible power of geospasial*. Contohnya dalam penyusunan peta tata ruang, data dasar kita berikan tak berbayar/*free*, demikian pula data tematik bahkan supervisi dan asistensi agar penyusunan tata ruang cepat selesai. Dampaknya tentu jelas, setelah peta tata ruang tersedia maka ada kepastian hukum investasi bagi pelaku usaha dan pengambil keputusan, serta kepastian pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan yang memberikan keamanan bagi penduduk sekitar. Dampak ini terus terjadi selama 20 tahun mendatang, mengingat waktu berlakunya tata ruang adalah 20 tahun meski dapat direvisi satu kali dalam lima tahun.

Penghujung 2018, kami melaporkan bahwa kegiatan di PPTRA menghasilkan output berupa model (4 model), peta (70 peta tematik) dan laporan (12 buku). Data, peta, dan laporan yang dihasilkan tersebut merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh berbagai pihak. Khusus tata ruang hampir 100% digunakan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengembangan wilayah, data lain relatif digunakan karena tidak langsung terkait dengan kebutuhan pembangunan daerah atau kepentingan perorangan. Untuk produk tersebut tentu memerlukan usaha aktif dari BIG dalam mengkampanyekan penggunaan data dan IG yang ada untuk mendukung bisnis mereka. Siapa yang pegang data maka akan pegang informasi, siapa yang pegang informasi akan menguasai pasar.

Oleh karena itu tentunya dapat pula diilustrasikan dalam penerbitan Newsletter ini pun bagian dari *service* informasi atas aktivitas pemetaan tata ruang, dinamika sumberdaya, dan atlas di BIG. Kamipun yakin akan memberikan efek bola salju untuk aktivitas lainnya. Inilah yang *alhamdulillah* kami syukuri walau mungkin tidak semua orang melihat muruah/kebaikan ke arah sana. [November 2018]

Tahun Sertifikasi dan Resiko Kebijakan

I*nsyaallah* kita akan sama-sama menyaksikan berakhirnya tahun 2018, tahun yang awalnya dipuja sebagai tahun baru pada akhirnya juga berlalu. Berbagai kenangan dan perbuatan akan terkubur, dan menjadi catatan kebaikan atau keburukan modal kehidupan ke depan. Tahun 2018 boleh disebut tahun sertifikasi, karena tahun inilah untuk pertama kalinya diberlakukan sistem sertifikasi profesi untuk tenaga penyedia jasa (konsultan) bidang informasi geospasial di BIG walaupun baru 25%. Kebijakan apapun yang diambil selalu ada resiko, demikian pula penerapan sertifikasi ini. Dampak paling nyata adalah adanya kelambatan dan gagal lelang beberapa pekerjaan kontraktual. Pelelangan paling cepat jelang April 2018, sementara dokumen sudah siap sejak Desember 2017. Tentunya kejadian ini mempengaruhi penyerapan. Walau demikian tetap patut disyukuri, penyerapan di PPTRA mencapai 90% dari target 97% karena beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan terkait kendala waktu. Namun demikian isu sertifikasi wajib didukung, terkadang kita perlu mundur sedikit untuk mempercepat pencapaian tujuan. Seperti bila kita menuju lokasi tertentu, jalan tidak selalu lurus, kadang terpaksa harus berbelok dan balik arah agar lebih cepat sampai.

Membahas penyerapan, tentu tidak lepas dari kegiatan percepatan peta tata ruang dalam hal ini bantuan teknis (bantek) dan bimbingan teknis (bimtek). Hingga Desember 2018, kami telah menuntaskan rekomendasi 18 RTRW prov/kab/kota dari 50 RTRW yang menjadi target bantek BIG. Selain itu kami juga menuntaskan pemeriksaan dan rekomendasi sekita 100 peta RDTR (Rencana Detail Tata

Ruang). Total rekomendasi yang telah kami keluarkan sekitar 277 peta RDTR skala 1:5.000 dari sekitar 1.800 RDTR yang menjadi amanah nasional. Untuk RTRW kami telah menyelesaikan sekitar 246 Peta RTRW dari sekitar 514 RTRW Kabupaten/kota dan 34 RTRW provinsi.

Data dasar RDTR diturunkan dari CSRT (citra satelit resolusi tinggi) khususnya untuk peta dasar skala besarnya yang belum tersedia. Sementara peta dasar RTRW merupakan updating dari peta RBI lama dengan citra satelit SPOT 6/7 tahun perekaman 2016-2017. Data CSRT sebagian (16%) adalah bantuan BIG dan sisanya merupakan usaha daerah sendiri, PPTRA membantu survei GCP dan ICP. Selesaiannya rekomendasi peta tata ruang ini, dengan sendirinya daerah telah memiliki data set digital peta dasar skala besar (1:5.000) dan peta skala menengah 1:50.000. Data ini dapat digunakan sebagai data dasar pembangunan bagi pemerintah daerah ataupun Kementerian dan Lembaga.

Selain produk tata ruang, produk yang tidak kalah pentingnya adalah terkait hasil kegiatan pemetaan sosial untuk mendukung penanganan kemiskinan di Provinsi Banten dan Jawa Barat. Adapula kegiatan dinamika spasial untuk mendukung *review* perkembangan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri Khusus (KIK) sampai 20 tahun kedepan. Demikian catatan yang mampu kami simpan, bahwa sebanyak apapun output kegiatan tidak akan memuaskan kami sebelum kami yakin produk tersebut bermanfaat buat banyak pihak. **[Desember 2018]**

Menyongsong Tahun SDG's

Memasuki tahun 2019, kami coba memaparkan informasi yang lebih padat dari biasanya dengan memunculkan kegiatan yang berdampak atau *outcome* atas pemanfaatan informasi geospasial. Hal ini tentu sesuai dengan amanah UU No 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, terutama atas penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik.

Ada tiga amanah peran BIG dalam penyelenggaraan IGT yaitu Integrasi Data (pasal 24), Pembinaan (pasal 57), dan pemanfaatan (pasal 47). Tugas itu tentu makin berat di tahun 2019 dan terlebih memasuki era RPJMN 5 tahun ke depan (2020-2024). Salah isu yang kuat adalah isu tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). BIG perlu mendukung pencapaian SGDs karena tema-tema yang diperlukan dalam mewujudkan capaian SDGs sebagian besar terkait isu spasial, terlebih pada pemanfaatan informasi geospasial tematik. Oleh karena itu penting bagi BIG menyusun dan meningkatkan kualitas dokumen Rencana

Strategis (Renstra) untuk 5 tahun ke depan. Walaupun pengalaman menunjukkan bahwa menjaga konsistensi dan implementasi program yang telah tertuang dalam Renstra yang sudah disusun sangat susah, karena adanya kebijakan pemerintah yang harus diantisipasi dan terkadang berubah.

Tahun 2018 telah berlalu, catatan apapun atas prestasi kinerja kita di tahun lalu dengan kategori baik atau buruk hanya jadi kenangan dan tidak bisa kita perbaiki lagi. Prestasi penyerapan yang mencapai 87.27% pun hanya jadi catatan. Meski demikian, memasuki tahun 2019 catatan-catatan tersebut akan berguna untuk perbaikan. Beberapa isu yang perlu di tangkap adalah percepatan tata ruang tetap menjadi prioritas kegiatan yang tidak boleh diabaikan, demikian pula penyusunan atlas geospasial Indonesia berupa atlas kewilayahan serta aktivitas pemetaan dinamika sumberdaya perlu ditingkatkan, termasuk pembangunan sistem aplikasi yang memudahkan evaluasi atas status peta tata ruang yang ada dan pengembangan e-atlas geospasial Indonesia. [Januari 2019]

Isu Money Follow Program

Fokus kegiatan kami di Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas tahun 2019 adalah penyiapan rencana program strategis untuk RPJMN 2020-2024 penyelenggaraan informasi geospasial bidang penataan ruang. Memasukkan program kegiatan dalam dokumen perencanaan RPJMN perlu dilakukan, agar sifat kegiatan berkelanjutan dan punya dasar hukum. Walau sebenarnya hal ini tidak selalu berlaku demikian, apalagi adanya isu *money follow program* maka pendanaan kegiatan mengikuti program prioritas nasional, bukan lagi terkait tupoksi.

Tahun 2019 boleh dibilang tahun politis, beberapa bulan lagi tepatnya April 2019 seluruh rakyat Indonesia akan mengikuti pemilihan umum, memilih presiden dan anggota legislatif. Bila berjalan lancar maka oktober ada pelantikan presiden. Konsekuensi peristiwa ini adalah bahwa inilah tahun yang sangat strategis untuk menyusun program dan juga tahun disrupsi karena adanya masukan visi misi presiden jelang akhir tahun (oktober). Sehingga semua program yang disusun di awal biasanya akan kembali disesuaikan dengan program baru pemerintah.

Salah satu fokus utama program yang ingin didaftarkan PPTRA adalah percepatan penyusunan peta tata ruang pada skala besar. Semakin dirasakan bahwa semua isu pembangunan nasional ternyata bermuara kepada persoalan tata ruang. Bila baik dan benar tata ruangnya, maka kompleksitas berbagai persoalan pembangunan dengan sendirinya akan baik penyelesaiannya. Pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) misalnya yang memiliki 17 tujuan pencapaian, 169 target, dan setidaknya 319 indikator dengan sendirinya akan mudah terbantu bila peta tata ruang, khususnya pada skala besar telah selesai dengan baik dan benar.

Oleh karena itu inisiasi memasukkan program percepatan pelaksanaan penyusunan tata ruang pada tahun 2019 ke dalam RPJMN 2020-2024 ini menjadi momentum yang besar bagi BIG dalam

melakukan perbaikan data informasi geospasial bidang penataan ruang. Salah satu persoalan yang sering ditanya ke kami adalah peran perguruan tinggi dalam membantu BIG melakukan validasi peta tata ruang sesuai amanah PP 8/2013 tentang ketelitian peta. Selalu kami katakan perguruan tinggi dapat berperan pada tiga aspek yaitu pemberian bimbingan teknis, pemberian asistensi, dan menjadi narasumber. Tentu bukan hanya persoalan tata ruang, wilayah perbatasan misalnya juga masalah status sumberdaya dan masalah pemetaan sosial indikator SDGs. Oleh karena itu dengan mengucapkan *bismillahirrohmanirrohim* di tahun 2019, kami akan lebih berusaha mensejajarkan program-program kami di tata ruang dan atlas dengan program penyelenggaraan IG yang lain. [Februari 2019]

Rakornas IG dan *Working Group* Pokja IGT



Suasana Rakornas IG 2019

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Informasi Geospasial (IG) 2019 dilaksanakan di Jakarta 27 Maret 2019, tema yang di usung adalah pembangunan berbasis geospasial. Rapat koordinasi ini mempertemukan pelaku penyelenggaraan informasi geospasial baik di Kementerian/Lembaga (KL) dan Pemerintah Daerah.



Partisipasi PPTRA di Rakornas IG

Tujuan rakornas adalah menyusun rumusan kebijakan nasional bidang IG yang akan disampaikan ke pemerintah melalui Menteri PPN/Bappenas sebagai masukan RPJMN 2020-2024 dan sekaligus menyusun rencana aksi 2020-2024 terkait penyelenggaraan IG dari masing-masing K/L agar tercapai penyelenggaraan IG yang efisien dan efektif.

Dalam sambutan pembukaan, Kepala BIG, Prof. Dr. Hasanuddin Z Abidin menyampaikan fakta bahwa saat ini banyak working group yang membahas IG, termasuk *working group* pada level dunia di bawah koordinasi PBB. Terdapat tren global peningkatan pemanfaatan IG untuk berbagai keperluan. Fenomena seperti Gojek, Gopay, dan layanan aplikasi berbasis peta lain menunjukkan bukti bahwa IG telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari manusia. Peningkatan tren pemanfaatan IG untuk berbagai keperluan tematik ini sayangnya tidak diikuti dengan kecepatan penyediaan informasi geospasial dasar, khususnya peta dasar. Padahal undang-undang mewajibkan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial tematik wajib mengacu kepada IG dasar. Masih terdapat kendala dalam penyediaan IG dasar termasuk akuisisi, vektorisasi, DEM, citra satelit resolusi tinggi, dan titik referensi. Strategi pemenuhan IG dasar yang diusulkan Kepala BIG yaitu: percepatan penyediaan IG dasar skala besar dan jaring kontrol, integrasi

data statistik dan informasi geospasial pada level administrasi terkecil, percepatan penyediaan IG tematik pada skala besar yang mengacu pada IG dasar, dan penguatan infrastruktur IG yang meliputi kelembagaan, standar, SDM, dan peraturan perundangan.

Rakornas IG 2019 ini tentunya adalah forum yang sangat penting sebagai forum koordinasi antar penyelenggara IG. Hal ini, karena inilah tahun penyusunan RPJMN 2020-2024 dimulai, yang nantinya akan diharmonisasikan dengan visi misi presiden terpilih. Bila tidak tercatat dalam RPJMN 2020-2024 tentunya sulit bagi K/L mendapatkan pendanaan dalam penyelenggaraan IG. Oleh sebab itu, disadari bukan tugas yang mudah bagi BIG untuk mengkoordinasikan, mencatat dan mengkompilasi program penyelenggaraan IG yang ada di K/L melalui forum Rakornas, tetapi bila gagal melakukan tugas tersebut maka rakornas IG hanyalah forum koordinasi internal BIG saja yang fokus pada program internal, yaitu penyelenggaraan IG dasar yang memang sudah tupoksi BIG. Tentu ini keadaan ini tidak kita inginkan. Terlalu banyak harapan disandarkan pada acara Rakornas IG 2019 ini, semoga forum rakornas ini melahirkan program-program unggulan penyelenggaraan IG dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh banyak pengguna dan komunitas IG. [Maret 2019]

Program Strategis



Kerjasama PPIDS dengan PSKIG

Tanpa terasa Caturwulan Pertama kegiatan 2019 hampir berakhir. Progres kegiatan di bulan April boleh dibilang belum ada yang signifikan menyerap anggaran di PPTRA. Penyerapan anggaran hanya masih berkisar 5% walaupun fisik sudah mencapai 9%. Meskipun belum ada penyerapan secara menyolok, namun beberapa kegiatan yang dilakukan sebenarnya bernilai strategis, misalnya koordinasi dengan PPIIG (sebelumnya bernama PPIDS) kerjasama dengan Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG (PSKIG). Kegiatan ini sangat strategis dalam upaya membantu percepatan asistensi dan pemberian rekomendasi tata ruang daerah. PPIIG diharapkan dapat membantu daerah dalam menyiapkan peta tata ruang yang lebih baik.

Program strategis lain adalah sosialisasi dan bimbingan teknis penyusunan neraca sumberdaya alam di daerah. Penting bagi daerah dalam menyusun neraca spasial. Bersama dengan kementerian terkait (KLHK, Kemen ATR/BPN, ESDM dan Pusair PU), BIG telah menyusun standar nasional indonesia terkait neraca, standar

tersebut yang kami sosialisasikan. Program ketiga yaitu suksesnya pembinaan IG untuk disabilitas netra di Manado. Tiga program tersebut sebenarnya mewakili fungsi utama penyelenggaraan IGT yang diamanahkan UU IG, yaitu pembinaan, baik kepada penyelenggara IGT maupun kepada pengguna IG. Program lain yang dilakukan di bulan April ini adalah koordinasi dalam hal pengintegrasian dan sinkronisasi data IGT khususnya dalam upaya menghasilkan standar penyelenggaraan IG tematik yang baik. Walaupun dalam implementasinya tidak mudah, masih banyak kendala dalam pelaksanaannya termasuk misinterpretasi di internal BIG sendiri.

Bulan ini hampir berlalu dan tidak dapat kami ulangi waktunya. *Alhamdulillah* banyak kesan tercipta bagi kami di PPTRA. Apapun hasilnya kami senang, apalagi karena saat ini kami tengah menyambut datangnya bulan Ramadhan 1440 H. Namun juga kami sedih dan haru karena inilah bulan terakhir kami bersama dengan Deputy Bidang IGT Dr. Ir Nurwadjadi, M.Sc.

Beliau selama ini banyak mendukung dan membantu program-program di PPTRA secara langsung. Mulai bulan ini beliau mendapat amanah baru sebagai widyaswara utama sehingga tidak bisa secara langsung menangani permasalahan kebijakan dalam penyelenggaraan IGT. Banyak hal baik telah beliau lakukan dan *alhamdulillah* kami bangga bisa membantu dan menjadi bagian dalam program tersebut. Kedepan kami akan terus meningkatkan program yang telah beliau mulai. Walau pergantian

pimpinan adalah hal yang wajar, tetap kami merasa sedih kehilangan figur bapak yang mengayomi. Menegor disaat kami salah dan menasehati untuk berbuat baik. Kami diarahkan agar mejadi bagian dari pemecahan masalah bukan menjadi bagian dari masalah. Selamat berkarya Pak Nur semoga tetap bisa membantu program-program PPTRA ke depan. Semoga bersama kita bisa menebar kebaikan demi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik yang lebih baik. [April 2019]

Hadiah Lebaran, “Temuan BPK Nihil”



Halal Bihalal PPTRA-BIG

Bulan Mei dalam suasana berpuasa, pola kegiatan diwarnai suasana finalisasi penyusunan program penyelenggaraan IGT 2020-2025, penandatanganan kontrak dan usulan kegiatan untuk tahun 2020. Sementara bulan Juni di warnai suasana lebaran dan libur panjang serta kelanjutan *addendum* kontrak, revisi DIPA, dan usulan restrukturisasi Kedepuitan IGT.

Hampir semua kegiatan kontrak sudah mulai berjalan di bulan Juni baik kegiatan FGD, pengumpulan data dan survei pendahuluan. Hal yang menggembirakan adalah berita tentang tidak ada temuan pada PPTRA hasil pemeriksaan BPK atas laporan

keuangan kegiatan tahun 2018. Tentunya ini suatu prestasi yang membanggakan sekaligus hadiah lebaran bagi semua jajaran staf di PPTRA. Catatan kekurangan dan kekecewaan dalam pelaksanaan kegiatan selama bulan Mei dan Juni bukannya tidak ada, namun kami menyikapinya secara terbuka dan profesional serta semangat untuk berbuat yang lebih baik sesudahnya.

Walaupun diakui kerja profesional, sesuai kompetensi dan aturan masih sangat sulit diwujudkan di lingkungan kerja saat ini akibat suasana lingkungan kerja yang penuh kompetisi mencari yang terbaik.

Alhamdulillah suasana spiritual ramadhan membantu kami menemukan kesadaran bahwa boleh jadi kita tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagi kita dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu tidak baik. Akhirnya memanfaatkan suasana Idul Fitri 1440 H, kami mengucapkan *taqabballahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin*. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 H. [Mei-Juni 2019]

Tata Ruang Perbatasan



Salah Satu Kajian Survei di Wilayah Perbatasan

Peran Informasi Geospasial (IG) dalam penataan ruang semakin dirasakan oleh pemerintah daerah. Penataan ruang yang baik memerlukan IG, karena efektivitas perencanaan yang baik dipengaruhi oleh tingkat ketelitian atau kedalaman pengaturan dan skala peta yang ada. Salah satu program dukungan penataan ruang BIG yang menjadi program prioritas nasional adalah penyusunan peta RDTR wilayah perbatasan.

Kegiatan pemetaan tata ruang perbatasan ditujukan untuk memfasilitasi penyediaan peta dasar dan verifikasi peta tematik yang dibutuhkan dalam menyusun RDTR. Hasil kegiatan berupa serangkaian dataset IG sebagai dasar pertimbangan sekaligus masukan Kementerian ATR/BPN untuk penetapan rencana tata ruang sebelum disahkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian fungsi IG menjadi penting terkait akurasi dan presisi data agar menghasilkan kualitas tata ruang yang lebih baik. Kegiatan prioritas nasional ini membutuhkan koordinasi dengan banyak sektor seperti Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Kementerian LHK, Kementerian PUPR dan pusat lain di internal BIG. Program

seperti ini diharapkan memacu percepatan penyediaan peta dasar pada kawasan yang tidak tersedia peta dasarnya.

Kementerian ATR/BPN secara mandiri melakukan penyediaan peta dasar pada wilayah yang tidak tersedia peta dasarnya, dan kegiatan tersebut dibolehkan secara hukum dengan bantuan dan supervisi dari BIG. Jadi program percepatan tata ruang yang dilakukan oleh PPTRA pada wilayah perbatasan pada dasarnya adalah atas nama dan semangat BIG untuk membantu percepatan penyelesaian tata ruang wilayah perbatasan, meliputi penyediaan IG baik berupa peta dasar, peta tematik dan substansi materi perencanaan yang sudah disesuaikan dengan muatan album peta. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa wilayah perbatasan termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang penataan ruangnya diprioritaskan. Wilayah perbatasan memiliki pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan, ekonomi, dan kesejahteraan dan bahkan lingkungan hidup. Penataan ruang KSN, termasuk perbatasan menjadi wewenang pemerintah pusat, termasuk BIG.

Selain membahas program perbatasan selama bulan Juni dan Juli, kami juga disibukkan dengan penyusunan atlas sumberdaya lahan gunung api. Atlas adalah output unik bagi BIG sehingga kegiatan penyusunan atlas akan terus kami dukung dan gaungkan, bahkan dalam rencana

restrukturisasi organisasi yang baru, PPTRA idealnya dipisah menjadi dua pusat yaitu Pusat Tata Ruang dan Pusat Atlas. Kita sudah mengusulkan rencana struktur baru tersebut, namun semua dikembalikan kepada kebijakan pimpinan di BIG dan tentu di Kementerian PANRB. [Juli 2019]

Launching Rekomendasi Online

Sistem Pelayanan Rekomendasi Peta RTR secara Elektronik

SUMBER DATA

Uraian	Uraian Data	Uraian Basis Wacana	Pertanian Mandiri	Kelengkapan Data
Formulir Lapangan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Baseline Processing	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tabel Uj Akurasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>

Progress 100% Kelengkapan Data

PETA DASAR

Uraian	Uraian Data	Uraian Basis Wacana	Pertanian Mandiri	Kelengkapan Data
Jaringan Transportasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="button" value="Data Belum Lengkap"/>
Jaringan Perairan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="button" value="Data Belum Lengkap"/>
Bangunan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tutupan Lahan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Kantor	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Toponim	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data Belum Lengkap"/>
Garis Pantai	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data Belum Lengkap"/>
Batas Administrasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data dan Bulet Lengkap"/>

Progress 57.5% Kelengkapan Data

PETA TEMATI

Uraian	Uraian Data	Uraian Basis Wacana	Pertanian Mandiri	Kelengkapan Data
Tematik Dasar	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tematik Aspek	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tematik Sektora	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tematik Jaringan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>

Progress 100% Kelengkapan Data

Sistem Pelayanan Rekomendasi Peta RTR secara Elektronik

SUMBER DATA

Uraian	Uraian Data	Uraian Basis Wacana	Pertanian Mandiri	Kelengkapan Data
Formulir Lapangan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Baseline Processing	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tabel Uj Akurasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>

Progress 100% Kelengkapan Data

PETA DASAR

Uraian	Uraian Data	Uraian Basis Wacana	Pertanian Mandiri	Kelengkapan Data
Jaringan Transportasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="button" value="Data dan Bulet Belum Lengkap"/>
Jaringan Perairan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Belum	<input type="button" value="Data dan Bulet Belum Lengkap"/>
Bangunan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Tutupan Lahan	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Kantor	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sesuai	<input type="button" value="Data Lengkap"/>
Toponim	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data dan Bulet Belum Lengkap"/>
Garis Pantai	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data dan Bulet Belum Lengkap"/>
Batas Administrasi	<input type="button" value="Unggah Data"/>	<input type="button" value="Unggah Bulet"/>	<input type="checkbox"/> Ulangi	<input type="button" value="Data dan Bulet Belum Lengkap"/>

Progress 37.5% Kelengkapan Data

Sistem Pelayanan Rekomendasi Peta RTR

Dua perhelatan yang mewarnai penyelenggaraan geospasial di bulan Agustus ini yaitu *Information Geospatial Technology Exhibition (IGTE)* dan *Indonesia Esri User Conference (IEUC) 2019*. Dua perhelatan tersebut sekaligus menyemarakkan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 74 dan Hari Informasi Geospasial (HIG) ke 50. Pembukaan acara tersebut dihadiri langsung oleh Jack Dangermond, pendiri sekaligus tokoh dibalik suksesnya ESRI mendominasi aplikasi GIS di seluruh dunia. IEUC 2019 ini adalah perhelatan pertama dari para pengguna ESRI di Indonesia, sementara

ESRI *user conference* sendiri selalu diadakan tiap tahun di San Diego Amerika Serikat yang dihadiri tidak kurang dari 16.000 pengguna produk ESRI seluruh dunia.





Alhamdulillah pada dua acara pembukaan tersebut, BIG meluncurkan (*launching*) sistem rekomendasi peta tata ruang secara elektronik (RPTR *online*). Sistem ini mengandalkan pada penilaian mandiri dalam menyusun tata ruang, *upload* bukti kualitas peta, dan memilih jadwal pelaksanaan pleno untuk uji petik peta tata ruang oleh BIG. Sistem juga bersifat *auto approved*, atau seluruh proses pemeriksaan seketika diketahui oleh pemohon jadwal uji petik peta tata ruang oleh BIG, sesuai amanah yang diminta dalam PP 8/2013 tentang Ketelitian Peta.

Lahirnya ide rekomendasi *online* ini tidak lepas dari adanya tuntutan percepatan penyelesaian tata ruang nasional yang dinilai sangat lambat. UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanahkan bahwa tata ruang provinsi diselesaikan dalam waktu 2 tahun dan tata ruang kabupaten/kota ditetapkan 3 tahun setelah UU ditetapkan. Sementara rencana detail tata ruang (RDTR) ditetapkan selama 36 bulan sejak tata ruang kabupaten /kota

selesai. Status terakhir 2019 baru sekitar 459 dari 514 tata ruang kabupaten/kota yang selesai dan hanya 53 RDTR yang disahkan dari 1800 jumah RDTR yang diamanahkan dalam RPJMN.

Percepatan penyelesaian tata ruang semakin dituntut setelah keluarnya Peraturan Presiden No. 24 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan istilah *Online Single Submission* (OSS). Adanya OSS ini akan memangkas berbagai persyaratan perijinan, bahkan untuk RDTR yang seharusnya 36 bulan dipangkas menjadi hanya selama 6 bulan. Pemangkasan waktu penyusunan RDTR, didasari akan pentingnya informasi tata ruang sebagai salah satu faktor penting penyelesaian konflik pemanfaatan lahan dan kenyamanan berinvestasi. Oleh karena itu sebagai instansi pemerintah BIG khususnya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas merasa bertanggung jawab untuk ikut melakukan terobosan dan inovasi guna percepatan pemberian rekomendasi melalui pengurangan waktu asistensi dan kemudahan pengajuan permohonan rekomendasi. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu, khususnya kepada tim kreatif dari PPTRA semoga *launching* sistem RPTR *online* ini memberi manfaat banyak pihak. [Agustus 2019]

South Asian Satellite Application Workshop

Alhamdulillah Newsletter ini sudah memasuki masa terbit tiga tahun. Tentunya dapat terbit selama 3 tahun mengembirakan kami. Berbagai potret kegiatan dan catatan beranda telah kami sajikan. Refleksi 3 tahun diperlukan agar newsletter ini makin baik dalam penyajian dan tetap terbit sebagai

upaya peningkatan pelayanan publik dari PPTRA.

Kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial selama bulan September diwarnai suasana politik yang memanas. Banyaknya aksi demonstrasi para mahasiswa di Jakarta dan hampir seluruh Indonesia berakhir rusuh.



Mahasiswa menuntut pembatalan revisi beberapa undang-undang yang dianggap tidak memperjuangkan aspirasi masyarakat secara umum, seperti UU KUHP, UU KPK, UU pertanahan dan UU perkawinan. Contohnya UU KPK, bahkan terkesan melemahkan peran KPK dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan dalam menghukum kaum miskin dan gelandangan. Para mahasiswa tidak melihat aspirasi lain dalam menegakkan suara mereka kecuali melalui demo. Bersyukur lokasi kantor BIG jauh dari lokasi kerusuhan sehingga tidak mengganggu aktivitas walaupun beberapa pertemuan di Jakarta terpaksa kami batalkan.

September ini juga ditandai dengan kunjungan kami ke Pusat Aplikasi Penginderaan Jauh (*land satellite application center - Lasac*), Kota Xian, Provinsi Xianmen, China untuk acara *South Asian Satellite Application Workshop* 4-6 September. Kami diskusi tentang perkembangan aplikasi satelit penginderaan jauh dan teknologi informasi geospasial serta kebutuhan aplikasi kedepan dan saran kerjasama. Di akui, China terbelang maju untuk teknologi satelit, baik untuk pemetaan dasar maupun pemetaan tematik. Kemandirian mereka dalam teknologi satelit ini menjadikan mereka juga mandiri dalam berbagai aspek teknologi turunan lainnya.

September ini pula pagu definitif program Tahun 2020 ditetapkan dalam pertemuan

trilateral meeting antara BIG-Bappenas – dan DJA Kementerian Keuangan. Walau terjadi penurunan pendanaan untuk PPTRA di tahun 2020 dibanding 2019, sebenarnya secara umum program kami di 2020 semakin banyak. Khusus tata ruang selain percepatan untuk melakukakan pemberian rekomendasi atas peta tata ruang daerah, kami juga diminta membantu percepatan peta tata ruang skala besar (RDTR) dalam program OSS (*online single submission*). Sehingga untuk tata ruang kami mesti menyiapkan tiga tim khusus, yaitu Tim percepatan tata ruang regular RTRW dan RDTR, Tim tata ruang Kawasan strategis khusus seperti perbatasan, KEK, KI dan KSN, dan juga tim khusus RDTR untuk OSS pada 59 kabupaten. Pekerjaan bertambah tetapi anggaran berkurang, sebenarnya ironis namun bisa kami maklumi. Prioritas BIG kali ini masih pada pemetaan dasar, kelak data dasar lengkap maka pekerjaan tematik akan lebih besar. Setidaknya itulah *statement* yang sering disampaikan pimpinan BIG kepada kami. Sebagai bagian tindak lanjut, kami mencoba menetapkan angan pendek, artinya apa yang bisa kami kerjakan saat ini kami kerjakan tidak menunggu masa depan. Angan pendek ini yang membuat kami tetap bekerja sesuai semangat bangkit dan senang menyajikan potret kegiatan dalam newsletter ini. Semoga newsletter ini makin baik dan berguna buat orang banyak. [September 2019]



**KEBIJAKAN
& ISU STRATEGIS**



Atlas Rencana Pembangunan Sebagai Alat Bantu Evaluasi Pembangunan Nasional

Dalam kunjungan kerja ke Badan Informasi Geospasial (BIG) pada Selasa, 23 Agustus 2016, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas, Prof. Dr. Bambang Brojonegoro, menyampaikan beberapa isu penting terkait informasi geospasial dan perencanaan pembangunan. Salah satunya, Bappenas berharap BIG dapat memetakan semua data perencanaan. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang sedang dilaksanakan di PPTRA, yaitu program Atlas Rencana Pembangunan dan Sosialisasi Informasi Geospasial untuk Pemetaan Tata Ruang.



Atlas pembangunan menyajikan informasi pembangunan yang bersumber dari data RPJM 2014-2019, data Musrenbang 2016, dan Perpres No. 3/2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Informasi tersebut disajikan dalam bentuk peta yang dilengkapi dengan gambar serta deskripsi singkat. Untuk memudahkan pemahaman pengguna atlas, tema dalam atlas dimaksud dibagi menjadi pembangunan infrastruktur, kedaulatan pangan, energi, dan kemaritiman.

Sebagai wilayah kajian, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai *pilot project*. Hal ini

terkait dengan adanya program kerjasama antara BIG dan Provinsi Jawa Tengah mengenai pemetaan batas desa dan adanya beberapa proyek strategis nasional yang berlokasi di wilayah ini. Melalui atlas ini, BIG berharap dapat memberikan gambaran secara spasial tentang pembangunan yang sedang dan akan berlangsung. Lebih jauh lagi, atlas ini juga dapat berfungsi sebagai masukan bagi para pengambil keputusan untuk melakukan evaluasi atas pembangunan yang sedang berjalan. [September 2016]

DESENTRALISASI ASISTENSI PETA TATA RUANG



Suasana Rapat Kerja Regional

Isu desentralisasi mencuat pada Sidang Komisi 1 Rapat Kerja Regional (Rakereg) BKPRN tanggal 9 September 2016 di Yogyakarta dengan tema “Penguatan Instrumen Penataan Ruang dalam rangka Percepatan Pembangunan Nasional”.

Isu desentralisasi muncul di tengah kenyataan bahwa hingga saat ini baru ada sekitar 23 dari 1.400 lebih wilayah yang memiliki RDTR yang sudah Perda. Salah satu kendala utama ada pada masalah pemetaan, sehingga diharapkan BIG dapat melakukan desentralisasi ke daerah dalam hal persetujuan peta tata ruang.

Isu desentralisasi adalah salah satu isu yang dibahas dari rangkaian acara Rakereg BKPRN yang dibuka oleh Dr. Sofyan A. Djalil, SH., MA, MALD., Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan dihadiri oleh pejabat eselon I dan II BKPRN, Bupati/Walikota terpilih, Ketua BKPRD provinsi, Kepala Bappeda Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi tata ruang di tingkat provinsi, Kepala Dinas Kelautan Daerah dan Provinsi, dan Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional.

Setelah pembahasan oleh *keynote speaker*, Rakereg dilanjutkan dengan sidang pleno yang menampilkan 5 pembicara yaitu: Deputy Bidang Pengembangan Wilayah Bappenas yang berbicara tentang kemajuan pelaksanaan kerja BKPRN 2016-2017, Dirjen Tata Ruang KemenATR/BPN tentang integrasi tata ruang dan pertanahan, Dirjen Bangda Kemendagri yang berbicara tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang tata ruang, Dirjen Planologi yang berbicara tentang isu perizinan dan Sekretaris Daerah Provinsi Yogyakarta yang berbicara tentang proses konflik bandara baru di Yogyakarta.

Acara dilanjutkan dengan Sidang Komisi 1 tentang perencanaan tata ruang, Komisi 2 tentang pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, dan Komisi 3 tentang kelembagaan penataan ruang. Pada dasarnya saat ini BIG telah mengakomodasi apa yang disebut desentralisasi asistensi melalui pelibatan PPIDS (Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial) dan BKPRD, penyiapan dukungan asistensi *online*, penyediaan tenaga ahli dalam proses asistensi dan *onsite* supervisi. [Oktober 2016]

BIG MENYIAPKAN E-ATLAS NASIONAL



www.atlas.big.go.id

Atlas sebagai kumpulan peta, merupakan produk kartografi yang digunakan sebagai alat untuk mencari informasi tentang suatu wilayah dan telah dikenalkan sejak pendidikan dasar. Seiring berkembangnya teknologi informasi, media dan interaktivitas atlas semakin berkembang. Tidak hanya dikemas dalam bentuk buku, atlas juga dapat diakses melalui internet dan memiliki potensi untuk dapat menjadi portal/pintu gerbang dalam pencarian informasi yang lebih luas.

Pada Tahun Anggaran 2016, Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas – BIG merintis pembangunan Atlas Nasional berbasis web atau dikenal dengan nama E-Atlas Nasional. Sebagai sebuah produk kartografi berbasis web, E-Atlas Nasional diharapkan mampu mengorganisasi, menyusun, dan menyajikan data geospasial, grafik dan multimedia yang disertai dengan narasi. E-Atlas Nasional diharapkan juga dapat mendukung pencarian dan penyebaran data dan informasi geospasial dan non geospasial terkait pembangunan nasional.

Secara sekilas, E-Atlas Nasional terdiri

atas dua sistem, yaitu Aplikasi Portal Atlas Tematik dengan sistem skala dinamis sebagai aplikasi WebGIS dan Aplikasi *flipbook* dengan sistem skala statis untuk menampilkan produk-produk atlas yang telah disusun oleh BIG dalam format *e-book*.

Adapun yang menjadi konten E-Atlas Nasional berasal dari Atlas Nasional Indonesia (ANI) yang telah disusun sejak tahun 2007 yang terdiri atas tema fisik dan lingkungan alam, potensi dan sumberdaya, sejarah, budaya, penduduk, Peta NKRI terbaru dan produk BIG terkini lainnya. Beragam produk atlas tematik BIG lima tahun terakhir akan disajikan dalam sistem skala statis berformat *e-book*.

Direncanakan, pengembangan E-Atlas Nasional akan dilakukan pada tahun mendatang dengan meningkatkan sistem yang dibangun dan penambahan fitur-fitur yang diperlukan. Kehadiran E-Atlas Nasional diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat umum dan berbagai kepentingan serta dapat menjadi portal Atlas Nasional pertama di Indonesia dalam menyebarkan berbagai produk Atlas yang telah dibangun BIG sampai dengan saat ini. [November 2016]

INTEGRASI NERACA SUMBERDAYA ALAM SUATU KEHARUSAN



Menindaklanjuti hasil sosialisasi penyusunan neraca sumberdaya alam yang dilaksanakan di beberapa kota seperti Makassar, Medan, dan Banten selama tahun 2016 diperoleh masukan bahwa daerah memerlukan metode integrasi neraca sumberdaya alam. Integrasi Neraca SDA adalah proses menggabungkan empat komponen neraca sumberdaya lahan yaitu hutan, lahan, air, dan mineral batubara (minerba) sehingga didapat pemahaman menyeluruh hubungan antar neraca tersebut. Seberapa jauh konversi lahan yang terjadi pada kawasan hutan dan non hutan berpengaruh terhadap ketersediaan air atau bagaimana pengaruh eksplorasi minerba terhadap kawasan hutan dan non hutan dapat diketahui manakala dilakukan integrasi data neraca tersebut.

Menurut Undang-undang (UU) 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa neraca SDA adalah instrumen ekonomi yang dapat digunakan untuk memonitor perkembangan wilayah. Selain itu neraca dapat digunakan untuk bahan review peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah nasional yang dianggap

sudah tidak sesuai dengan perkembangan di lapangan dan kebijakan nasional. Keinginan meninjau ulang tata ruang dengan data neraca sejalan dengan surat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang penetapan Tim Revisi peninjauan kembali tata ruang No 15.1 tanggal 6 Januari 2016. Tim beranggotakan sekitar 11 instansi termasuk melibatkan Kepala Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, BIG sebagai anggota. Selain UU yang mewajibkan pemerintah daerah menyelesaikan neraca spasial, pada masa lalu terdapat Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian Dalam Negeri dan Kepala Bakosurtanal. Sesuai dengan perkembangan kebijakan, tampaknya SEB tersebut patut diperbaharui.

Tim Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya melakukan serangkaian kegiatan dalam mengantisipasi kebijakan tersebut. Melalui kerja sama dengan Fakultas Geografi UGM telah diselesaikan metode integrasi neraca SDA dan sekaligus telah diujicobakan pada dua wilayah yaitu di Kalimantan Barat dan Sulawesi Utara. Kedepan, tantangan kegiatan pemetaan dinamika sumberdaya semakin tinggi. Untuk itu saatnya kerja keras, cerdas, mawas, tuntas, santun, dan ikhlas untuk peningkatan produk Bidang Dinamika Sumberdaya. **[Desember 2016]**

PUSAT PTRA MULAI MENGGARAP PERBATASAN



Wilayah perbatasan menjadi perhatian khusus pemerintah Joko Widodo–Jusuf Kalla melalui program Nawacita. Hal ini diperkuat dengan salah satu isi Nawacita yang intinya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah perbatasan dan pulau terpencil. Konsep pembangunan ini dikenal dengan istilah desentralisasi asimetris, artinya ada penguatan-penguatan di wilayah atau provinsi tertentu. Wilayah perbatasan menjadi prioritas yang harus segera diselesaikan dengan merealisasikan “Negara Hadir” untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi antar wilayah perbatasan. Kurangnya perhatian Pemerintah Indonesia dalam mengelola kawasan perbatasan berdampak pada kerugian dalam penyelesaian sengketa, kerusakan lingkungan sampai dengan berubahnya batas negara.

Salah satu program percepatan pembangunan wilayah perbatasan adalah pembangunan wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang saat ini terdiri dari 31 PLBN. Sampai tahun 2016, Pemerintah melalui Kemen ATR/BPN dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah

menyelesaikan materi teknis di 10 PLBN yang akan digunakan dalam penyusunan RDTR khususnya di Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan NTT.

Salah satu kelemahan dari materi teknis yang telah disusun tersebut adalah belum tersedianya informasi geospasial (IG) baik dasar maupun tematik dengan skala analisis 1:5.000 sesuai kaidah dalam penyusunan RDTR. Hal tersebut menyebabkan kegiatan ini belum menghasilkan Peta RDTR seperti yang diinginkan sebagai salah satu dokumen rencana pengembangan wilayah perbatasan. Melihat adanya *trade off* seperti ini, Bappenas melalui Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyarankan BIG melalui PPTRA untuk berkontribusi menyelesaikan sekaligus menyediakan IG untuk mendukung RDTR di wilayah PLBN. Tindak lanjutnya adalah rapat koordinasi antara Bappenas - BIG - ATR/BPN - BNPP pada tanggal 19 Januari 2017 menyepakati bahwa PPTRA di Tahun Anggaran 2017 ini berkontribusi dalam penyusunan IG untuk mempercepat RDTR di 6 PLBN Provinsi Nusatenggara Timur dengan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). [Januari-Februari 2019]

PERAN PPTRA DALAM Mendukung Sustainable Development Goals

Pusat PTRA BIG cukup banyak menghasilkan Informasi Geospasial Tematik (IGT) khususnya atlas dengan berbagai tema, sejak era Bakosurtanal hingga BIG. Seiring dengan isu-isu nasional terkait sosial dan meningkatnya kebutuhan IGT, bukan hanya tema sumberdaya alam dan lingkungan saja yang diperlukan, akan tetapi juga tema pemetaan sosial. Oleh karena itu, hal ini menjadi penting untuk ditingkatkan, baik dari jumlah tema maupun kualitas produknya. Apalagi Indonesia sedang menghadapi Agenda Pembangunan Pasca 2015, salah satunya terfokus pada program *Sustainable Development Goals* (SDGs), di mana permasalahan sosial dan ekonomi cukup dominan untuk segera diselesaikan.

Namun demikian, ketersediaan atlas dan pemetaan terkait sosial belum banyak yang dihasilkan. Untuk itu perlu koordinasi dan kolaborasi dengan para *stakeholder* baik Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D), Perguruan Tinggi maupun masyarakat. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang intensif diharapkan atlas dan pemetaan terkait sosial akan lebih banyak dikembangkan.

Berdasarkan tipe datanya, data geospasial

yang berkaitan dengan tema sosial antara lain kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan isu-isu terkait tema tersebut. Berbagai macam data sosial ini akan diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar agar dihasilkan informasi geospasial yang handal baik dari segi akurasi geometris maupun konten informasi tematiknya.

Ke depan, agar data sosial ini lebih terorganisasi dan terstruktur, diperlukan suatu basis data atlas dan pemetaan sosial yang lengkap. Terkait hal tersebut, pada Tahun Anggaran 2017 Pusat PTRA mempunyai kegiatan menyusun Basis data Atlas dan Pemetaan Sosial dengan lingkup level nasional dan kedetailan informasi pada level provinsi kabupaten/kota, dan kecamatan. Lingkup substansi meliputi inventarisasi data sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan data dukung lain, desain dan penyusunan dataset informasi geospasial bertema sosial, serta desain kartografi untuk album peta sosial wilayah.

Diharapkan melalui penyusunan basis data atlas dan pemetaan sosial yang akurat, makin mempermudah dalam menyusun atlas dengan berbagai tema sosial yang semakin diperlukan terutama untuk mendukung SDGs. [Maret 2017]

Rotasi dan Mutasi Pegawai

Rotasi dan mutasi adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi, demikian pula yang terjadi pada PPTRA awal April 2017 telah terjadi pergantian pejabat struktural di PPTRA. Dra. Niendyawati, M.Sc menggantikan Dra. Prita Brada Bumi, M.Sc sebagai kepala bidang

Atlas dan Pemetaan sosial, serta bergesernya Habib Subagio, S.Si, M.Si menjadi kepala bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya menggantikan Drs. Sri Daryaka, M.Sc, serta masuknya Ryan Pribadi, ST sebagai kepala bidang Pemetaan Tata Ruang.



Pengambilan Sumpah Jabatan

Bidang Pemetaan Tata Ruang fokus pada pemetaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) wilayah perbatasan beserta penguatan asistensi dan konsultasi online tata ruang, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial mulai menguatkan tugas pada pemetaan sosial dan pengembangan situs Atlas Indonesia online, sementara bidang Dinamika Spasial SDA melakukan kajian integrasi neraca sumberdaya alam wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dan wilayah perkotaan.

Sistem validasi peta tata ruang menjadi *role model* untuk validasi IG tematik lainnya. Ini pula yang kami terapkan saat

membantu permasalahan hutan Gunung Sawal di Kabupaten Ciamis, atas permintaan beberapa anggota DPRD Kabupaten Ciamis pada 12 April 2017. Para anggota DPRD merasa perlu melihat IG untuk mengetahui informasi pemanfaatan lahan antara Perhutani, pengusaha dan masyarakat Desa Gola, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Hasil temuan lapangan sudah diplotkan kedalam Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 dan peta RTRW kabupaten Ciamis dan peta eksisting *land use* dan menjadi bahan dalam rapat pembahasan tim pangsus kebun kopi tersebut. [April 2017]

Geospasial Tematik Sosial

Untuk mencapai visi mewujudkan cita-cita pembangunan nasional berbasis kewilayahan, PPTRA menetapkan sasaran strategis yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan IG tata ruang/atlas dan pemetaan sosial/dinamika sumberdaya yang sesuai dengan agenda Prioritas Nasional (PN).

Terkait dengan pemetaan sosial, dari sepuluh agenda PN yang akan dicapai sampai 2019, terdapat setidaknya tiga PN yang terkait yaitu pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan. PPTRA memandang strategis pengembangan pemetaan sosial melalui pemanfaatan

sebesar-besarnya informasi geospasial untuk bidang pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Selama ini program dan kegiatan di BIG lebih menitikberatkan kepada penyelenggaraan pemenuhan IG Nasional secara teknis/fisik, masih minim yang berkaitan dengan pemanfaatan IG untuk bidang sosial. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika saat ini penyusunan pemetaan sosial lebih ditingkatkan perannya guna melayani masyarakat luas.



Penyerahan Buku Atlas



Audio Taktual

Terkait bidang pendidikan perlu ditingkatkan pemahaman spasial sejak usia prasekolah hingga dewasa melalui penyusunan atlas untuk anak-anak apenyandang disabilitas netra, PPTRA membuat Peta Taktual berbagai tema yang disampaikan langsung ke institusi Sekolah Luar Biasa. Untuk bidang kesehatan, perlu mengoptimalkan data geospasial mendukung pemetaan sebaran penyakit, sebaran fasilitas/infrastruktur kesehatan, sebaran tanaman obat, serta integrasinya dengan data lingkungan sehingga masyarakat mendapat informasi yang valid tentang kesehatan secara spasial/ keruangan.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan, perlu penyusunan peta-peta

tematik dasar yang dapat dimanfaatkan bagi pengguna untuk melakukan analisis lebih lanjut terkait kemiskinan. Upaya yang dilakukan adalah memanfaatkan semaksimal mungkin data statistik instansi terkait dan mengintegrasikannya dengan IGT yang ada sehingga diperoleh informasi komprehensif untuk mendukung penanggulangan kemiskinan. Selain konten dan tampilan atlas, yang tidak kalah penting harus dikembangkan kedepan adalah penggunaan teknologi informasi berbasis web atau pemanfaatan aplikasi menggunakan *smartphone*. Hal ini akan meningkatkan nilai kemanfaatan sebuah informasi yang ingin disampaikan ke masyarakat secara mudah dan cepat. [Mei 2017]

Percepatan Peta RDTR

Berawal dari kritikan berbagai pihak bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) *time dwelling* asistensi yang terkesan lama, kami melakukan review dalam proses asistensi. Point pertama, kami temukan selama tahun 2016, terdapat sekitar 1500 kunjungan asistensi ke PPTRA dan 1300 diantaranya berupa asistensi RDTR. Sekitar 60-70% masalah yang dibahas adalah CSRT belum sesuai, CSRT belum

terkoreksi, dan peta dasar belum selesai. Artinya masalah lamanya proses asistensi yang memerlukan beberapa kali pertemuan adalah pada peta dasar dan data dasar.

Point kedua, kami temukan dari sekitar 1013 wilayah BWP RDTR yang saat ini sedang dalam proses konsultasi, 55 % diantaranya berstatus CSRT belum terkoreksi dan 45% data CSRT sudah terkoreksi dalam proses asistensi.

Percepatan hanya mungkin dilakukan pada wilayah yang 45%, inipun dengan catatan kami mendapat suntikan energi selain dari yang diputuskan dalam RKP 2018 BIG.

Kebijakan percepatan yang akan dilakukan meliputi konsultasi *online*, optimalisasi tim terpadu antar *stakeholder*, sosialisasi dan *workshop*, uji implementasi dan survei GCP, pemetaan RDTR wilayah prioritas, dan penyusunan pedoman asistensi. Kebijakan ini tentu memerlukan dukungan pimpinan. RKP 2018 sepertinya belum menggambarkan adanya prioritas percepatan pemetaan tata ruang. Masalah percepatan pada sekitar 55% wilayah lainnya, berada di luar wewenang kami, perlu dukungan pusat atau instansi lain.

Selain dua temuan tersebut di atas,

tantangan lain yang tidak kalah seriusnya adalah kenyataan bahwa wilayah yang tersedia Citra Satelit Rosulusi Tinggi (CSRT) untuk pemetaan tata ruang sampai tahun 2017, sebenarnya baru tersedia sekitar 55% dari kebutuhan nasional. Untuk wilayah tersebut, LAPAN tengah membangun stasiun penerima CSRT mulai tahun 2018, kemampuan akuisisi sekitar 350.000 km²/tahun. Diperkirakan dalam waktu 3 tahun atau pada tahun 2021 seluruh wilayah RDTR dapat tersedia CSRT. Bila tahun 2021 baru tersedia citra mentahnya tanpa dibarengi koreksi citra, bisa dipastikan masalah yang saat ini terjadi akan berulang di tahun tersebut. Ini menjadi PR bersama nantinya, [Juni 2017]

Menggarap Kawasan Strategis



Penyerahan Produk ke Bappenas

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu yang mencakup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan

kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Pada dasarnya KEK dibentuk untuk membuat lingkungan kondusif bagi aktivitas investasi, ekspor, dan perdagangan guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi serta sebagai katalis reformasi ekonomi. Inisiasi KEK diinspirasi dari keberhasilan beberapa negara yang lebih dulu mengadopsinya, seperti Cina dan India. Bahkan data-data empiris menggambarkan bahwa KEK di negara tersebut mampu menarik para investor, terutama investor asing untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.

Sampai saat ini pemerintah telah menetapkan 11 KEK, yaitu KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), KEK Sorong, KEK Morotai, KEK Bitung, KEK Palu, KEK Mandalika, KEK Tanjung Lesung, KEK Tanjung Kelayang, KEK Tanjung Api-Api, KEK Sei Mangkei, dan KEK Arun Lhokseumawe.

PPTRA sampai saat ini terus berkontribusi aktif dalam rangka percepatan implementasi seluruh wilayah KEK tersebut. Terkait masalah tata ruang, PPTRA terus berkoordinasi dengan K/L seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian ATR/BPN serta pemerintah daerah pada setiap wilayah KEK untuk melakukan percepatan penyelesaian IG RTRW dan RDTR sebagai salah satu instrumen pada basis perencanaan ruang wilayah.

Selain itu, PPTRA juga berkoordinasi secara intensif dengan BAPPENAS dan sektor terkait lain untuk melakukan kajian

pengembangan wilayah melalui penyusunan model skenario pengembangan wilayah melalui analisis ekonomi, analisis sosial-penduduk, serta analisis dampak dinamika spasial perubahan penggunaan lahan pada seluruh wilayah KEK. Pada tahun 2017, KEK Tanjung Lesung merupakan kawasan terpilih untuk penyusunan model dinamika spasial. Sementara itu, pada Rencana Kegiatan Pemerintah 2018, 3 wilayah KEK yaitu Mandalika, Sorong, dan MBTK akan dilaksanakan kegiatan serupa, sementara sisa lainnya akan dilaksanakan sampai tahun 2019. [Juli 2017]

Intensifkan Kegiatan Asistensi, PPTRA Percepat Penyelesaian Peta Rencana Tata Ruang

Salah satu peran BIG yang cukup penting sesuai amanat PP No. 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang adalah bahwa seluruh peta rencana tata ruang wajib dikonsultasikan kepada BIG. Pada tahun 2016, jumlah pertemuan asistensi untuk RDTR dilakukan sebanyak 1.393 kali, sementara untuk RTRW kabupaten dan kota mencapai 111 kali pertemuan. Kondisi ini kemungkinan akan berbeda di tahun 2017 karena banyak RTRW provinsi, kabupaten, dan kota telah memasuki periode 5 tahun dan sudah masuk pada tahap peninjauan kembali. Diperkirakan jumlah pertemuan

asistensi dan supervisi di BIG akan meningkat baik untuk peta RTRW maupun RDTR.

Kondisi di atas mengharuskan PPTRA berpikir kreatif membuat program-program percepatan penyelesaian peta RTRW dan RDTR. Berbagai upaya dilakukan PPTRA untuk melakukan program percepatan penyelesaian peta rencana tata ruang. Salah satunya berupa Program Kegiatan Asistensi secara intensif. Program ini diadakan dalam rangka mengatasi kendala keterbatasan SDM daerah dalam perpetaan RDTR, serta kendala terkait *dwelling time* penjadwalan asistensi lanjutan di BIG.



Suasana Klinik Intensif

Dalam program ini, tim perpetaan dari pemerintah daerah akan didampingi secara intensif oleh tim PPTRA untuk menyelesaikan petanya. Tim daerah akan melakukan pertemuan intensif setiap hari di BIG untuk membahas dan menyelesaikan persoalan teknis perpetaannya yang diasistansi oleh Tim PPTRA. Selama kurang lebih 7 hari, seluruh permasalahan teknis perpetaan akan dibahas dan diselesaikan secara tuntas. Secara signifikan, program ini menambah jumlah daerah yang telah menyelesaikan proses asistansi di BIG.

Program kegiatan asistansi secara intensif ini menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan jumlah personil dibandingkan dengan jumlah daerah yang membutuhkan asistansi merupakan tantangan utama. Di samping itu, program ini juga terkendala oleh terbatasnya jumlah ruangan asistansi

di PPTRA. Namun, kedua hal itu akan dapat diatasi melalui penjadwalan asistansi dengan disiplin yang tinggi.

Keberhasilan pelaksanaan program asistansi intensif membutuhkan dukungan semua pihak, baik komitmen tim asistansi PPTRA, dukungan pimpinan BIG, dan tentunya pemerintah daerah sendiri sebagai pihak yang berkepentingan terhadap penyelesaian peta rencana tata ruang. Pada tahun 2018 diharapkan kendala program intensif ini sudah teratasi, serta penganggaran kegiatan ini lebih tepat sasaran. Melalui penganggaran yang lebih terencana dan terprogram, maka pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat lebih efektif dan efisien untuk menjangkau daerah-daerah yang belum menyusun peta rencana tata ruang. [Agustus 2017]

Menata Kawasan Perbatasan

Menganggap wilayah perbatasan sebagai halaman belakang merupakan paradigma lama yang harus ditinggalkan. Saat ini wilayah perbatasan menjadi beranda depan yang perlu terus dibangun dan diperhatikan. Salah satu Program Nawacita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah memprioritaskan pembangunan wilayah pinggiran, perbatasan, dan desa. Hal ini telah ditindaklanjuti oleh Badan Informasi Geospasial dengan berbagai program kegiatan, sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit teknis.

Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas pada tahun 2017 telah mengimplementasikan Program Nawacita tersebut, salah satunya dengan melakukan penyusunan Dataset Atlas dan Pemetaan Sosial Wilayah Perbatasan di Kalimantan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis BIG mengingat

wilayah perbatasan menjadi prioritas pembangunan. Melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial dilakukan penyusunan dataset berbasis keruangan yang terfokus pada aspek ekonomi dan sosial. Kedua aspek tersebut merupakan aspek penting, sekaligus merupakan bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu dalam upaya menyejahterakan rakyat. BIG sebagai badan yang menyelenggarakan dan atau mengintegrasikan data/ informasi geospasial, memastikan dukungan wilayah terhadap pelaksanaan percepatan kawasan perbatasan sekaligus sebagai bagian dari dukungan SDGs di tingkat lokal. Ketersediaan data/informasi geospasial wilayah perbatasan merupakan bagian penting dalam rangka membantu dan mendorong peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pertengahan September 2017, PPTRA telah melakukan survei terkait sosial ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia. Survei dilakukan di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, dan di Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan. Kedua wilayah tersebut merupakan pintu negara dan menjadi beranda terdepan yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, serta menjadi akses perlintasan pelintas batas selain di Entikong dan Badau.

Dalam survei tersebut dilakukan pendataan dan *tagging* lokasi beberapa fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial ekonomi lainnya. Data hasil survei ditambah data sekunder lainnya akan menjadi dataset Informasi Geospasial (IG) yang bermanfaat untuk mendukung pengelolaan ruang wilayah perbatasan, serta membantu menyelesaikan permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan. [September 2017]

Kebijakan Pendanaan Percepatan Program PPTRA

Rapat pimpinan BIG bulan Oktober lalu, membahas dan menyorot soal program 2018. Khususnya PPTRA terkait percepatan tata ruang, kajian spasial dinamis dan pemetaan atlas aktual. Hasil pertemuan trilateral antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan BIG beberapa waktu sebelumnya memang telah menyepakati adanya tambahan dana dari pusat teknis lain untuk mendukung percepatan pemetaan tata ruang. Rincian tambahan dana tersebut tersebar pada dua program utama PPTRA yaitu sekitar 6,5 milyar untuk mendukung percepatan peta tata ruang pada 150 BWP (bagian wilayah perencanaan) dan sekitar 3 milyar untuk kajian spasial dinamis terkait pengembangan model spasial dinamis untuk mengetahui dinamika spasial sumberdaya kawasan, ekonomi, sosial dengan laju konversi lahan pada Kawasan Bandar Kayangan sebagai Global Hub Bandar di Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Rapat menyepakati pentingnya informasi hasil kajian spasial dinamis bagi pengambil kebijakan dalam menentukan skenario pengembangan wilayah. Demikian pula pemahaman atas program percepatan tata ruang yang terbagi menjadi beberapa kegiatan berupa bantuan dan bimbingan

teknis penyelesaian RDTR pada 100 BWP dan penyelesaian RTRW pada 50 BWP, serta dukungan asistensi dan supervisi peta tata ruang melalui kerjasama dengan perguruan tinggi di Jawa dan luar Jawa. Percepatan peta tata ruang mutlak diperlukan agar persoalan mengenai isu penyusunan tata ruang tidak terhambat karena persoalan peta. Sementara hasil *review* kami dan berdasar pengalaman dalam asistensi, persoalan lambatnya penyusunan tata ruang lebih pada beberapa isu seperti kawasan kehutanan dan kajian KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis).

Yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk PPTRA adalah bagaimana menata ulang kegiatan atlas aktual yang tidak hanya uji keterbacaan tetapi menuju atlas aktual digital dan menjadikan atlas aktual nasional menjadi bahan ajar di sekolah luar biasa (SLB). Banyak masukan yang saat ini sedang dibahas internal. Saat ini PPTRA sedang mencari rekan kerja dan narasumber terkait atlas aktual digital. Tentu bukan pekerjaan mudah tetapi juga bukan hal yang mustahil bila kita dapat menyiapkan atlas aktual digital dan lebih interaktif misalnya ada volume suara sehingga para penyandang disabilitas dapat menikmati hak informasi geospasial yang memang diatur dalam undang-undang. [Oktober 2017]

Peran BIG Mendukung SDG's



Sudah sering kita mendengar tentang istilah SDG's *Development Goals* agenda pembangunan dunia untuk kesejahteraan manusia. Apa makna SDG's itu?. SDG's merupakan Sustainable kelangsungan kehidupan berkelanjutan di planet bumi yang ditetapkan oleh PBB pada September 2015 menggantikan kerangka pembangunan sebelumnya yaitu MDG's (*Millenium Development Goals*) yang sudah dilaksanakan dari tahun 2000. Kerangka pembangunan global ini memiliki rentang pelaksanaan 15 tahun sehingga SDG's ini akan berakhir pada 2030 nanti.

Indonesia menjadi bagian dari implementasi *platform* pembangunan global ini yang secara langsung juga sejalan dengan agenda pembangunan pemerintah dalam Program Nawacita. Selain itu, pemerintah juga memastikan dengan menyusun kerangka pelaksanaan SDG's dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Secara garis besar kerangka SDG's terdiri atas 4 pilar yaitu:

1. Pembangunan Sosial;
2. Pembangunan Ekonomi;
3. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola;
4. Pembangunan Lingkungan.

Selain itu, SDG's terdiri dari 17 tujuan,

169 target, dan 475 indikator seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Nasional (TPB) yang disiapkan oleh Bappenas pada tahun 2017.

Tujuan pembangunan untuk mencapai Nawacita maupun SDG's telah menghasilkan paradigma pembangunan baru yang dikenal dengan HITS (Holistik - Integratif, Tematik, dan Spasial). Unsur spasial menjadi variabel penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Output dan dampak pembangunan juga akan lebih terukur dengan adanya informasi spasial salah satu basis dalam merepresentasikan seluruh program pembangunan.

Dalam upaya mencapai tujuan SDG's ke depan, diperlukan kerjasama multi pihak dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Informasi spasial akan menjadi instrumen penting untuk mengawal implementasi seluruh program pembangunan. Menjadi tantangan besar bagi BIG untuk segera menyiapkan skema tata kelola informasi geospasial nasional, peningkatan pembinaan kepada walidata, penerapan kepatuhan standar pelaksanaan penyelenggaraan, sampai dengan penerapan mekanisme berbagi pakai IG. [November 2017]

Pemetaan Sosial untuk Pendidikan



Pengecekan Peta Pendidikan

Secara umum pemetaan kelompok sosial di BIG sangat kecil persentasenya (kurang dari 10%) dibandingkan dengan kelompok pemetaan non sosial. Oleh karena itu, keberadaan dan kontribusinya sering terabaikan. Beberapa pemetaan sosial yang pernah disusun antara lain Atlas Taktual untuk penyandang disabilitas netra, Atlas Junior untuk anak-anak usia prasekolah hingga anak Sekolah Dasar. Atlas Sejarah yang disusun melibatkan pakar sejarah dan ditampilkan menarik untuk umum.

Pada tahun 2017 ini disusun Atlas Pendidikan terdiri dari 19 tema sesuai dengan kurikulum SMP bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu juga disusun Atlas Bentanglahan Kalimantan yang menampilkan bentanglahan dan kondisi sosial budaya. Sebelumnya juga telah disusun Atlas Bentanglahan Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Atlas ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber materi bahan ajar bagi sekolah menengah tingkat atas maupun perguruan tinggi

minat kebumihan. Output/produk atlas dan pemetaan sosial yang telah dibuat oleh BIG dapat langsung digunakan oleh masyarakat sebagai wahana pembelajaran terkait informasi spasial, baik secara perorangan maupun kelompok, dan secara formal maupun informal.

Tahun 2018 akan dilakukan kegiatan pemetaan sosial untuk mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini termasuk dalam Program Prioritas Nasional, dimana sesuai tuisi BIG dapat berkontribusi khususnya pada pemenuhan Program Prioritas (PP) terkait Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. Pada PP tersebut terdapat 5 kegiatan yang telah ditetapkan yaitu penyaluran bantuan pangan non tunai, jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah, subsidi energi tepat sasaran, dan penguatan bantuan tunai bersyarat. Dari ke 5 kegiatan dalam PP tersebut, BIG berkontribusi dengan menyusun kegiatan yang hasilnya dapat digunakan untuk mendukung ke-5 kegiatan yang ada di PP tersebut melalui kegiatan berbasis spasial dan temporal. Untuk arah kajian ke depan, pemetaan sosial berbasis spasial dan temporal masih sangat terbuka luas dan masih banyak tema yang bisa dikaji. Dataset sosial ekonomi yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, dan lainnya cukup banyak tersedia. Namun belum banyak yang dioptimalkan melalui kegiatan dan kajian berbasis spasial dan temporal.

Beberapa permasalahan sosial terkait kependudukan, seperti analisis rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat pendapatan, kesenjangan sosial, dan yang sejenis dapat dikaji lebih dalam. Hal lain yang perlu dikaji adalah permasalahan terkait kejahatan yang ada di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, bencana

sosial akibat konflik sosial, permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kebakaran, fasilitas umum, bahkan permasalahan sosial dikaitkan dengan politik. Pemecahan permasalahan tersebut perlu mendapat dukungan analisis sosial berbasis spasial dan temporal. **[Desember 2017]**

Kebutuhan Data Tematik Kawasan Prioritas

Mengawali tahun 2018 ini, Bappenas telah melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait kebutuhan Informasi Geospasial, khususnya Informasi Geospasial dasar (IGD). IGD akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rencana detail tata ruang (RDTR) yang telah dan akan disusun Pemerintah Daerah. RDTR yang menjadi lokasi prioritas (lokpri) adalah yang berada di sekitar Perbatasan Negara, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI). Untuk itu IGD diarahkan dapat memenuhi kebutuhan wilayah prioritas tersebut. Penyediaan IGD pada dasarnya merupakan amanat RPJMN, untuk mendukung arah kebijakan dan strategi tata ruang.

Kebutuhan IGD tahun 2018 sudah teridentifikasi di wilayah PKSN Lokpri Perbatasan. Lokasi tersebut meliputi 24 lokasi yaitu PKSN Lokpri Ketungau Hulu, Jagoi Babang, Bikomi Utara, Kafemenanu, Teluk Mutiara, Krayan, Longpahal, Kayan Hulu, Tanimbar Selatan, Simanggaris, Atambua, Pulau-pulau Aru, Tahuna, Wetar, Sota, Sorong Barat, Amfoang Timur, Alor Timur, Daruba, Sanggowo, Berebre, Jayapura Utara, Marore, Miangas, Nanusa, dan Tanah Merah. Sedangkan untuk RDTR sekitar KEK dan KI terdapat sebanyak 5 lokasi yaitu KEK MBTK, KEK Morotai, KI

Sei Mangkei, KI Morowali, dan KI Bantaeng. Sedangkan data dari Kementerian ATR/BPN terdapat sebanyak 49 lokasi RDTR yang berada di sekitar perbatasan negara dan perlu didukung pengadaan petanya, baik IGD maupun IGT. Diharapkan BIG dapat mengakomodir kebutuhan tersebut.

Terdapat sekitar 165 RDTR dari data pemerintah daerah yang perlu dipercepat dengan skema bantuan teknis Pemerintah Pusat. Pada tahun 2018 Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG telah mengalokasikan program untuk percepatan 100 RDTR dan 50 RTRW kabupaten/kota. Daerah yang akan dilayani adalah yang sudah tercatat pernah melakukan asistensi ke BIG. Bantuan teknis dirancang untuk mempercepat penyelesaian peta rencana dan album peta rencana tata ruang sehingga rekomendasi perpetaan dari BIG dapat dikeluarkan.

Adanya koordinasi antara kementerian lembaga yang terkait, khususnya BIG dan Kementerian ATR/BPN, diharapkan secara signifikan dapat mempercepat penyelesaian RDTR kabupaten/kota sampai pada tahap pengesahan peraturan daerah. Untuk tahun 2019, dari hasil rapat tersebut secara tentatif sudah teridentifikasi kebutuhan IGD untuk beberapa wilayah yang akan disusun RDTR nya. BIG dalam hal ini menjadi bagian penting dalam pengalokasian anggaran pemetaan skala detail. **[Januari 2018]**

IG Bidang Kesehatan

Bisa dikatakan informasi geospasial (IG) saat ini sedang naik daun. Peranan IG tidak diragukan lagi, makin merambah ke berbagai sektor. IG tidak hanya digunakan untuk memecahkan permasalahan teknis fisik sumber daya alam semata, namun telah meluas pemanfaatannya di bidang sosial. Bidang IG dan Pemetaan Sosial - PPTRA, telah diundang oleh berbagai instansi pemerintah untuk membahas pemanfaatan IG sesuai kebutuhannya. Sebagai contoh pentingnya IG di bidang keuangan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Pemerintah dan masyarakat semakin merasakan peran IG, baik dalam mendukung tugas dan fungsi suatu instansi pemerintah, maupun dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Pada akhir Januari lalu, BIG diundang oleh Sekretariat Nasional Keuangan Inklusi (SNKI) agar berkontribusi dalam penyediaan data dan IG untuk menyusun aplikasi yang berisi informasi dan jenis layanan finansial berbasis spasial. Aplikasi ini untuk mempermudah dan dalam rangka lebih mendekatkan layanan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam penyusunan aplikasi berbasis spasial tersebut, Lembaga SNKI bersinergi antara Lembaga Pemerintah dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *World Bank* dan *Women Bank* untuk menjawab fakta bahwa masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum tersentuh oleh jasa keuangan modern. BIG dapat berkontribusi dalam penyusunan aplikasi berbasis spasial tersebut.

Peran IG di bidang kesehatan sudah lebih lama dimanfaatkan dibanding IG di bidang keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir ini, BIG telah berkontribusi untuk penentuan

lokasi ekosistem yang akan dijadikan area pengambilan sampel nyamuk, tikus, dan kelelawar dalam riset khusus vektora. Selain itu pada tahun 2015 telah dilakukan pemetaan sebaran fasilitas kesehatan di Jakarta berupa sebaran pelayanan sosial/ BPJS, Puskesmas, dan dokter. Pada pertengahan Februari ini, BIG diminta menjadi narasumber dalam pertemuan teknis evaluasi dan validasi Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) di Bogor. Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan petugas pengisi ASPAK dari seluruh Indonesia tersebut, BIG memberi masukan terkait pemetaan sarana dan prasarana alat kesehatan yang tersebar diseluruh Indonesia. Pertanyaan peserta cukup menarik terkait spasial dengan ASPAK antara lain bagaimana memasukkan data spasial lokasi puskesmas yang belum ada di dalam aplikasi, mengapa lokasi puskesmas di aplikasi ASPAK tidak sesuai dengan lokasi yang sebenarnya, bagaimana memasukkan data kondisi bangunan pada aplikasi tersebut, dan masih banyak pertanyaan yang terkait dengan spasial. Hal ini menandakan bahwa petugas kesehatan pun sudah mulai sadar pentingnya IG dalam menunjang pelaksanaan tugas mereka sehari-hari.

Peran IG di bidang kebudayaan, sudah tidak asing lagi. Sebagai catatan, peran BIG (Bakosurtanal) bidang kebudayaan terlihat sejak 1970an hingga sekarang. Tahun 1970 diawali dalam pencarian jejak situs Majapahit di Trowulan dan setelah itu disusun beberapa atlas terkait tema sejarah, budaya serta terlibat dalam asistensi RDTR yang mengalokasikan situs/cagar budaya sebagai bagian dari kawasan lindung.

BIG cukup intensif membantu sektor budaya karena sadar Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya. IG sangat penting untuk pemetaan sebaran lokasi bersejarah dan budaya diseluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya diperlukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, namun juga bagi komunitas terkait sejarah dan budaya serta bagi para wisatawan baik lokal maupun asing. *Bravo* BIG, berkibarlalh semakin tinggi demi melayani masyarakat yang kian sadar akan pentingnya IG. [Februari 2018]

Perencanaan Skala Besar

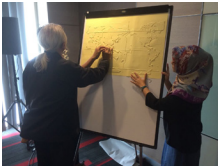
Kebutuhan peta dasar skala besar di masa mendatang adalah mutlak. Hal ini terkait akan kebutuhan peta perencanaan skala besar untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Peran data dan informasi geospasial tak hanya sebagai model untuk menggambarkan substansi rencana dalam bentuk spasial, namun juga sebagai data masukan dalam proses penyusunan rencana. Semakin detail rencananya, maka tuntutan skala peta juga semakin besar.

Peta perencanaan skala besar menuntut kedetailan obyek-obyek yang harus digambarkan. Aspek ketepatan posisi dan geometris sangat diperlukan. Perbedaan akurasi dan presisi ini akan menjadi masalah ketika proses sinkronisasi dilakukan pada peta perencanaan detail dengan skala besar. Sebagai contoh, koordinasi rencana detail tata ruang dengan aspek kepemilikan tanah menuntut adanya koordinasi dan sinkronisasi antara peta RDTR dengan peta persil kepemilikan tanah pada skala 1:5.000 dan skala 1:1.000. RDTR sebaiknya sudah mempertimbangkan aspek status kepemilikan tanah pada penyusunan rencana. Permasalahan lainnya adalah sinkronisasi dengan peta pajak bumi dan bangunan yang juga pada skala 1:1.000. Kondisi ini tidak hanya membutuhkan penyediaan peta dasar skala besar secara cepat, namun juga menyiapkan seperangkat

standar dan aturan teknisnya.

Dalam Rakornas IG tanggal 21 Maret 2018, Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pentingnya penyediaan peta skala besar untuk RDTR. Hal ini menjadi kewajiban BIG untuk menjawab tantangan tersebut. Saat ini, data untuk RDTR masih mengandalkan ketersediaan citra satelit resolusi tinggi. Kendala yang dihadapi masih cukup besar, baik aspek teknis maupun non teknis. Aspek teknis erat kaitannya dengan tutupan awan dan tidak adanya data ketinggian dari citra optis. Hal ini menyebabkan peta RDTR hanya digambarkan dalam bentuk dua dimensi saja. Pemetaan dengan foto udara, Lidar atau Airborne IFSAR akan membutuhkan waktu akuisisi dan pengolahan yang relatif lama. Dengan demikian, menjadi tantangan BIG untuk merealisasikan kebijakan satu peta skala besar yang cukup kompleks, mulai dari koordinasi, sinkronisasi, serta penyusunan standar dan aturan teknis yang lengkap. [Maret 2018]

Peta Taktual sebagai Sarana Geoliterasi Inklusi



Peta merupakan salah satu bentuk informasi geospasial yang paling populer, baik dalam bentuk peta dasar maupun tematik. Peta digunakan sebagai sarana dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengambilan keputusan dalam pembangunan. Peta juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencerdaskan bangsa, baik digunakan pada satuan pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Sejalan dengan program global terkait pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/TPB (SDGs), peta memegang peran penting untuk mendukung pencapaian tujuan di hampir semua pilar.

TPB secara spesifik menasar pada pihak yang rentan, sehingga diharapkan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal “no one left behind”. Terkait dengan prinsip TPB tersebut, peta atau IG yang dihasilkan oleh BIG harus bermanfaat bagi masyarakat terutama kelompok yang rentan.

Salah satu produk Pusat PTRA yaitu Atlas Taktual yang telah disusun sejak 2010 hingga sekarang, masih sangat relevan dengan TPB tersebut, namun harus terus dikembangkan. Potensi pengembangan kedepan adalah pembuatan Atlas Taktual Audio.

Atlas ini merupakan kombinasi antara atlas taktual yang diproduksi dengan fasilitas yang memungkinkan penyandang disabilitas netra mendengarkan informasi spasial lainnya, sehingga informasi yang diterima menjadi lebih banyak. Pusat PTRA berharap masyarakat penyandang disabilitas netra ini memperoleh informasi geospasial yang intens dan sejajar dengan masyarakat yang lain. Jadi, tidak terlalu berlebihan jika kita mengatakan “Peta Taktual sebagai Sarana Geoliterasi Inklusi”, karena menasar pada kelompok rentan dan minoritas. [April 2018]

Tata Ruang Nasional

Saat ini banyak rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi, kabupaten dan kota yang sudah masuk tahap peninjauan kembali dalam periode 5 tahun. Berdasarkan hasil review dapat terlihat apakah RTRW masih relevan untuk dilanjutkan atukah harus dilakukan revisi. Jika revisi, maka RTRW tersebut akan dilakukan perubahan yang terkait pada perubahan petanya. Revisi RTRW ini akan membutuhkan data dan informasi kondisi terakhir wilayah tersebut, baik yang terkait

spasial maupun non spasial.

Hal yang menarik terkait revisi maupun penyusunan RTRW baru saat ini adalah telah terbitnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Kabupaten dan Kota. Mengapa menarik? Karena pada Permen ATR ini menjelaskan tata cara penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota, dengan menekankan pentingnya informasi geospasial atau peta di dalamnya.

Dalam Permen ATR ini disebutkan bahwa tata cara penyusunan RTRW terbagi dalam tahapan Persiapan, Pengumpulan Data dan Informasi, Pengolahan dan Analisis Data, Penyusunan Konsep RTRW, dan Penyusunan dan Pembahasan Raperda.

Pada kegiatan persiapan dalam Permen ATR No. 1/2018 disebutkan bahwa ahli-ahli yang perlu dipersiapkan adalah ahli sistem informasi geografis dan ahli survei pemetaan wilayah, disamping ahli-ahli lainnya seperti ekonomi, infrastruktur, dan lingkungan. Mengapa secara khusus diperlukan ahli sistem informasi geografis serta ahli survei dan pemetaan?. Hal ini dikarenakan permen tersebut mencantumkan data peta atau informasi geospasial yang dibutuhkan seperti peta rupabumi sebagai peta dasar, serta peta tematik seperti peta geomorfologi dan peta kemampuan lahan. Ketentuan mengenai peta-peta ini adalah harus bersumber dari instansi yang berwenang dan mengikuti standar berdasarkan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Kebijakan Satu Peta, dimana

seluruh peta harus memiliki referensi yang sama dan dapat dipertanggungjawabkan.

Memperhatikan alur analisis pada Permen ini, maka informasi geospasial akan lebih banyak digunakan untuk analisis pada aspek fisik wilayah, walaupun juga digunakan pada analisis aspek lainnya seperti analisis kependudukan, analisis ekonomi, maupun analisis sarana prasarana. Namun perannya lebih banyak pada pemahaman terhadap karakteristik fisik wilayah untuk melihat sebaran sumber daya alam, potensi bencana alam serta kemampuan lahan pada wilayah yang direncanakan. Hal ini sejalan dengan kebijakan BIG khususnya Kedeputian Informasi Geospasial Tematik untuk menekankan pentingnya penggunaan informasi geospasial tematik bagi perencanaan pembangunan. Melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, maka aspek analisis fisik dan wilayah ini, secara aktif menekankan penggunaan informasi geospasial tematik dan analisis kemampuan lahan pada kegiatan asistensi pemetaan tata ruang untuk daerah. [Mei 2018]

Launching Atlas Mudik



Sebagai bagian dari strategi implementasi kebijakan satu peta (*One Map Policy*) dan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi geospasial yang akurat, BIG,

melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas bekerjasama dengan Institut Teknologi Nasional (ITENAS), telah meluncurkan Atlas Jalur Mudik 2018 pada 30 Mei 2018. Atlas jalur mudik ini berbasis informasi geospasial yang akurat, terbaru dan informasinya dapat dipertanggungjawabkan terkait posisi dan lokasi geografis objek di sepanjang jalur mudik tidak saja di Pulau Jawa - Bali, namun juga wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.



Jumpa Pers dengan Kepala BIG

Sebagai salah satu implementasi Kebijakan Satu Peta (KSP), atlas jalur mudik ini telah mengintegrasikan berbagai peta tematik yang bersumber dari berbagai Kementerian/Lembaga antara lain informasi jalan tol dan non tol mengacu informasi resmi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat informasi rawan bencana mengacu dari peta rawan bencana dari BIG dan BNPB, informasi lokasi *rest area* dari Kementerian Perhubungan, serta validasi lapangan dilakukan oleh tim BIG dan Itenas.

Atlas ini dapat digunakan tidak hanya sebagai perencanaan jalur mudik namun juga dapat digunakan sebagai informasi terkait kewilayahan. Atlas ini disusun diatas citra satelit SRTM yang dapat menampilkan relief muka bumi, dilengkapi informasi toponim disetiap jalan yang dilalui, sehingga diharapkan masyarakat pengguna atlas jalur mudik ini juga dapat memahami wilayah sekitar yang mereka lalui. Selain informasi letak *rest area*, lokasi rawan banjir dan rawan longsor, atlas jalur mudik ini dilengkapi dengan informasi letak SPBU, rumah sakit, serta lokasi wisata. Informasi penting lainnya masih terbuka untuk

ditambahkan di tahun berikutnya. Untuk kedepan, pembuatan atlas jalur mudik ini sudah seharusnya menggunakan peta dari BIG dengan penambahan informasi tematik sesuai kebutuhan masing-masing penyusun. Diharapkan tidak ada lagi peta jalur mudik yang dibuat hanya semacam sketsa dengan kurang memperhatikan posisi geografisnya. Melalui peta dasar yang sama akan menghasilkan informasi spasial terkait mudik yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wacana “**Kebijakan Satu Peta Mudik**” yang dilengkapi berbagai informasi dari berbagai K/L terkait, dirasa makin penting untuk segera diwujudkan sehingga masyarakat yang akan mudik menggunakan kendaraan pribadi mendapatkan informasi secara utuh dan komprehensif. **Baca atlasnya, pilih jalurnya, sampai ke kampung halaman tercinta. Selamat Mudik. Mudik Lancar, Mudik Ceria. Utamakan Selamat. [Juni 2018]**

BIG dan Nencana Sumberdaya Alam

Program neraca kapital sumberdaya alam menjadi instrumen penting yang dilakukan oleh sebagian besar negara maju. Sebagai contoh di Uni Eropa, pelaksanaan penyusunan neraca kapital sumberdaya merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh anggota negara yang masuk dalam Uni Eropa (*European Union*). Hal serupa juga dilakukan oleh negara maju lain seperti Amerika, Jepang, dan Australia. Nilai kapital sumberdaya alam menjadi bagian subsistem dari sistem ekonomi nasional, bahkan sudah masuk pada level yang lebih detail dengan memasukkan klasifikasi *tangible* maupun *intangible* dari setiap komponen sumberdaya alamnya.

Bagaimana dengan Indonesia? Kita sudah mulai menuju arah program tersebut melalui kegiatan WAVES. WAVES merupakan program penghitungan sumberdaya alam (*natural capital accounting*) di negara berkembang tropis yang diinisiasi sejak tahun 2010 oleh Bank Dunia bersama lembaga PBB, lembaga pemerintah, dan lembaga non-pemerintah. WAVES memfasilitasi dukungan penerapan *natural capital accounting* dalam sektor lingkungan/SDA tertentu yang memiliki prioritas ekonomi tinggi. Selain itu, WAVES juga memfasilitasi pemahaman SEEA (standar SDA internasional), kaitan laporan SDA (*assets accounts*) dengan *national account*, dan identifikasi ukuran/indikator yang dibutuhkan untuk kebijakan yang efektif. Pihak yang terlibat sebagai *Steering Committee* WAVES di Indonesia yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan. Badan Informasi Geospasial melalui Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya,

sampai sejauh ini sudah rutin dilibatkan dalam beberapa pelatihan dalam program peningkatan kapasitas SDM seperti *Training on Macroeconomic Indicators* pada tahun 2016-2018 yang diselenggarakan oleh Dirjen Kekayaan Negara (DJKN-Kemenkeu).

BIG sampai saat ini sudah menyusun SNI neraca spasial sumberdaya alam yang terdiri dari 4 komponen SDA meliputi; hutan, lahan, air, dan minerba. Kedepan, instrumen spasial ini akan diintegrasikan bersama dalam Sistem Neraca Lingkungan yang dikembangkan oleh BPS dalam kerangka penyediaan informasi fiskal sumberdaya nasional dan daerah.

Dalam rangka mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan 2015-2030, PPTRA-BIG bersama Direktorat Sarana Urusan Pemerintah Daerah-Ditjen Bangda menyiapkan instrumen neraca spasial sumberdaya alam ini sebagai bagian dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai tindak lanjut dari Permendagri No 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS-RPJMD. [Juli 2018]



Sumber: WEF Report, 2014

Status Tata Ruang Nasional



www.gistaru.atrbpn.o.id

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Pemerintah harus menyebarluaskan informasi yang terkait rencana umum dan rencana rinci tata ruang, arahan peraturan zonasi, serta pedoman bidang penataan ruang. Dengan amanat itu maka seluruh peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta peraturan daerah terkait rencana tata ruang harus disebarluaskan termasuk petanya sebagai bagian tidak terpisahkan dari sebuah peraturan.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah No 15 tahun 2010, pasal 15 disebutkan bahwa perlu dibuat suatu pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang mutakhir, efisien dan terpadu. Pengembangan sistem informasi tersebut dilaksanakan melalui penyediaan basis data dan informasi bidang penataan ruang dengan mengembangkan jaringan elektronik. Tujuan dari pengembangan sistem informasi ini adalah agar masyarakat dapat mengakses dan menjangkau dengan mudah. Untuk mewujudkannya, terutama pada aspek perpertannya, saat ini Kementerian

Agraria dan Tata Ruang (ATR) telah mengembangkan www.gistaru.atrbpn.go.id yaitu berupa portal yang mempublikasikan peta-peta rencana tata ruang dalam format GIS berbasis Web. Melalui portal ini, maka peta-peta rencana tata ruang yang telah melalui tahapan asistensi teknis perpetaan di BIG, serta tahapan substansinya telah selesai di Kementerian ATR, dapat ditampilkan pada portal tersebut. Rencana tata ruang yang ditampilkan pada portal tersebut hanya yang sudah disahkan.

Masyarakat dapat mengakses peta rencana tata ruang dari berbagai tingkatan, mulai dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau, rencana tata ruang kawasan strategis nasional sampai dengan rencana tata ruang provinsi, kabupaten dan kota. Pengembangan ke depan, portal ini juga dapat menampilkan peta-peta RDTR berskala besar. Masyarakat juga dapat membandingkan arahan rencana tata ruang tersebut antar tingkatan dengan melakukan *overlay* peta-petanya.

Sebagai catatan bahwa peta-peta rencana tata ruang ini tampil dalam sistem tersebut merupakan usaha panjang BIG untuk mewujudkan satu sistem perpetaan di Indonesia melalui kebijakan satu peta. Kegiatan asistensi peta-peta rencana tata ruang di PPTRA berkontribusi besar dalam terwujudnya hal tersebut. Terwujudnya

sistem informasi geografis peta rencana tata ruang berbasis web ini maka amanat pasal 13 UU No 26 tahun 2007, yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi penataan ruang, telah dilaksanakan. [Agustus 2018]

Sentuhan Teknologi Spasial Memberi Nilai Tambah Dalam Representasikan Data Sosial



Produk-Produk Atlas di periode Tahun 2018

Produk informasi geospasial berupa atlas merupakan salah satu produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Namun membuat atlas kadang-kadang terkendala oleh ketersediaan data, keterbatasan jumlah SDM dan bahkan anggaran, sehingga atlas yang disusun kurang maksimal terutama terkait kelengkapan dan *updating* data. Untuk meniasati hal tersebut, salah satu langkah yang perlu ditempuh adalah berkolaborasi dengan berbagai kalangan antara lain Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, organisasi, bahkan komunitas tertentu yang mempunyai banyak data.

Pada akhir September 2018 ini, kami bertemu dengan komunitas sejarah –

budaya yang hobi mengumpulkan data terkait bangunan/obyek bersejarah dan budaya. Kekayaan data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Alangkah sayangnya jika data-data bernilai historis yang layak dijual untuk pariwisata tersebut tidak termanfaatkan dengan maksimal. Untuk itu, Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial mulai melirik alternatif sumber data, terutama yang dikumpulkan secara mandiri oleh berbagai komunitas seperti komunitas sejarah, cagar budaya, arkeologi, batik, kuliner, dan komunitas tujuan positif lain untuk dijadikan sumber materi dalam pembuatan atlas dengan berbagai tema yang menarik yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

Kolaborasi dengan berbagai komunitas tersebut tentu menguntungkan kedua belah pihak dimana BIG mendapatkan data sosial yang selalu terbaharui, sedangkan pihak komunitas mendapatkan tambahan pengetahuan terkait geospasial, bagaimana menspasialkan data yang telah mereka kumpulkan dan merepresentasikannya pada

sebuah peta. Dengan sentuhan teknologi geospasial, data sosial tersebut diyakini jauh lebih bermakna. Pada akhirnya menghasilkan informasi yang mempunyai nilai tambah sekaligus sebagai upaya meng"geoliterasi" masyarakat. [September 2018]

Satu Data Indonesia

Boleh dibilang Pemerintah sedikit terlambat dalam mengatur dan menyiapkan kebijakan terkait data. Bekangan ini, data banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan seperti aparaturnya pemerintahan, masyarakat, bisnis, penegak hukum, dan masyarakat sipil. Sering kali dalam debat publik yang kita lihat diberbagai media, data yang bersifat resmi selain menjadi rujukan juga sekaligus acuan yang tidak dapat dibantah, segala argumen yang diperdebatkan sering kali ditutup dengan kata bijak 'kita semua akan menerima argumen tersebut apabila didukung dengan data yang lengkap dan akurat'. Begitu pentingnya arti sebuah data yang memiliki informasi penting dan memiliki efek penting pada sebuah aktivitas, dimana data diperlukan mulai dari suatu awal perencanaan, proses analisis, sampai output suatu aktivitas yang juga mengeluarkan suatu data (informasi).

Pemerintah sendiri secara tegas menyatakan arti penting data pada level yang sangat tinggi, seperti dikutip dari UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 31 yang menyatakan 'Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan'. Dari beberapa diskusi dengan Bappenas, sering kali kita mendapatkan penerjemahan pasal ini yang kira-kira berarti bahwa data

yang dimaksud adalah data yang bersifat angka-angka numerik, sementara informasi yang dimaksud adalah informasi geospasial yang memberikan dimensi keruangan terhadap sebuah data. Tentunya ini menjadi landasan yang sangat prinsip sekaligus menjamin pelaksanaan pembangunan yang lebih terukur.

Dari sektor informasi geospasial, diawali dengan lahirnya UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial, menjamin tersedianya satu referensi pemetaan yang sama dan memastikan informasi geospasial yang dihasilkan oleh seluruh pemangku data spasial menggunakan referensi pemetaan yang sama pemetaan yang sama sehingga untuk dapat digunakan secara akurat dalam mendukung program pembangunan nasional dan daerah. Pemerintah juga sudah lebih sigap menyelesaikan pekerjaan rumah tentang data dan informasi geospasial dengan mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Satu Peta yang menjamin adanya satu data referensi pada sektor data geospasial tematik.

Kebijakan publik, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan kinerja pemerintah, hingga peluang bisnis, semuanya membutuhkan data yang kredibel. Sayangnya, dalam praktiknya data masih sering tidak dikelola secara serius.



SATU DATA
INDONESIA

Masih banyak ditemukan kasus di mana terdapat data yang tidak hanya memiliki beragam versi, namun sering juga saling kontradiktif di antara satu dengan yang lainnya.

Inisiatif Satu Data, atau yang biasa disebut Satu Data Indonesia, merupakan salah satu inisiatif pemerintah Indonesia yang mencoba untuk membenahi permasalahan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan data pemerintah tersebut. Satu

data memiliki tiga prinsip utama yaitu; satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antara instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi publik. Kita berharap, kebijakan Satu Data Indonesia dapat segera terealisasi dengan harapan dapat menstimulasi upaya-upaya perbaikan tata kelola data pemerintahan di Indonesia, artinya penggunaan data akan semakin terstruktur dan akan meningkatkan kualitas kebijakan dan pelayanan publik di Indonesia. [Oktober 2018]

Informasi Geospasial yang Makin “Seksi”

Informasi geospasial atau peta saat ini dianggap sesuatu yang “seksi” yang dapat menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi lembaga-lembaga yang selama ini “berhaluan” non geospasial. Menampilkan data berupa tabel, angka dan deskripsi dirasa sangat hambar dan kurang informatif tanpa disertai informasi terkait spasial atau keruangan. Informasi geospasial menjadi salah satu menu yang harus tersaji dalam sistem informasi potensi daerah, dimana sistem informasi ini akan menjadi ujung tombak promosi dan sosialisasi yang harus disampaikan pemerintah kepada dunia usaha (investor). Apalagi bagi kementerian/lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), yang semua itu berujung pada realisasi investasi. Semakin valid data yang disajikan dan dilengkapi dengan informasi spasial yang memadai, maka semakin besar peluang menarik investor baru.

Untuk menarik investasi di suatu wilayah maka perlu informasi tentang potensi suatu

daerah yang dapat digambarkan melalui peta, tidak hanya sekedar deskripsi dan data tabular semata. Disamping itu, informasi geospasial juga berguna untuk memantau realisasi perusahaan-perusahaan yang telah diberikan ijin. Percuma saja ijin diberikan namun tidak direalisasikan sehingga tidak berakhir pada nilai investasi. Jenis informasi spasial yang diperlukan dalam menyampaikan potensi suatu daerah agar membuahkan ketertarikan pada investor antara lain informasi terkait letak, posisi, arah, ukuran, kondisi geografis, dan kondisi sekitar obyek yang ingin dipasarkan termasuk infrastruktur dan fasilitas yang tersedia.

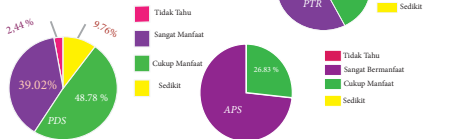
Informasi spasial dapat ditampilkan berupa peta maupun citra yang dapat menggambarkan struktur keruangan yang komprehensif dari suatu obyek yang ingin “dijual” sehingga berpotensi menarik investor. Melalui dukungan dan nilai tambah menu informasi geospasial ini, diharapkan dapat memperkaya sistem informasi potensi daerah yang ada pada setiap Kabupaten/Kota. [November 2018]

Survei Internal PPTRA dalam Rangka Reformasi Birokrasi

Beberapa isu strategis akhir tahun yang banyak dibicarakan adalah bisnis proses, sertifikasi kompetensi, *outcome* kegiatan, kepuasan publik dan sumberdaya manusia. Untuk mendapatkan info umum tersebut, selama 10 hari telah dilakukan survei internal di PPTRA atas beberapa isu tersebut dan

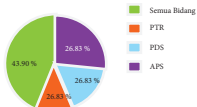
hasilnya cukup menarik untuk disajikan. Beberapa isu menarik seperti bidang favorit, staf teladan hingga staf yang tidak dapat dijadikan panutan. Survei juga dilakukan untuk mengetahui jenis output yang bermanfaat dan tidak. Dalam beberapa hari ke depan akan diumumkan hasilnya. Selamat menikmati hasil survei. [Desember 2018]

1 Setiap bidang di PPTRA sudah melakukan yang terbaik dalam menjalankan kegiatan dan pencapaian output kegiatan. Menurut anda seberapa manfaat output mereka kepada masyarakat ?



	TIDAK ADA	SEDIKIT	CUKUP MANFAAT	SANGAT MANFAAT	TIDAK TAHU	TOTAL	WEIGHTED AVERAGE
Bidang APS	0.00 % 0	0.00 % 0	26.83 % 11	73.17 % 30	0.00 % 0	41	3.73
Bidang PDS	0.00 % 0	9.76 % 4	48.78 % 20	36.84 % 16	2.44 % 1	41	3.34
Bidang PTR	0.00 % 0	2.44 % 1	39.02 % 16	56.10 % 23	2.44 % 1	41	3.59

2 Bila anda diminta memilih maka anda akan suka bekerja di bidang ?



ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Bidang APS	26.83 %	11
Bidang PDS	17.07 %	7
Bidang PTR	12.20 %	5
Semua Bidang	43.90 %	18
Total	100 %	41

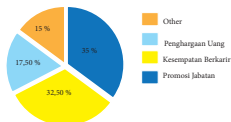
3 Saya pilih DIA sebagai pegawai tersebut karena ?

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Pekerja Keras	15,00 %	6
Cerdas	7,50 %	3
Kerja Tuntas	20,00 %	8
Kerja Mawas	5,00 %	2
Kerja Ikhlas	5,00 %	2
Jujur	5,00 %	2
Ramah	0,00%	0
Rajin	12,50 %	5
Other (please specify)	30,00 %	12
TOTAL	100 %	40



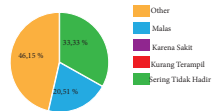
4 Penghargaan Apa yang layak diberikan Pusat kepada pegawai teladan 2018 tersebut ?

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Promosi Jabatan	35,00 %	14
Kesempatan Berkarir	32,50 %	13
Penghargaan Uang	17,50 %	7
Other	15,00 %	6
Total	100 %	40



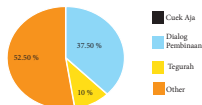
5 Atas pegawai Bermasalah di pusat menurut anda apa penyebabnya

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Sering Tidak Hadir	33,33 %	13
Kurang Terampil	0,00 %	0
Karena Sakit	0,00 %	0
Malas	20,51 %	8
Other	46,15 %	18
Total	100 %	39



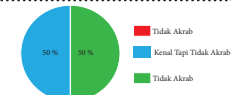
6 Bila anda diminta memilih maka anda akan suka bekerja di bidang ?

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Cuek Saja	0 %	0
Dialog Untuk Pembinaan	37,50 %	15
Tegoran	10,00 %	4
Other	52,50 %	21
Total	100 %	40

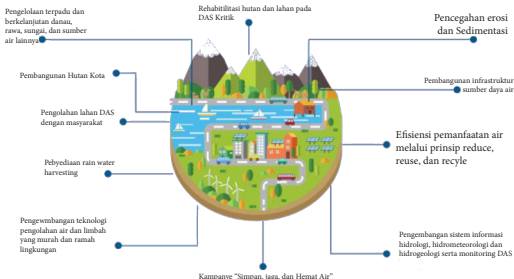


7 Seberapa jauh anda mengenal calon pegawai teladan PTR 2018 tersebut

ANSWER CHOICES	RESPONSES	
Sangat Akrab	50 %	20
Kenal Tapi Tidak Akrab	50 %	20
Tidak Akrab	0 %	0
Total	100 %	40



Peran Penting Dinamika SDA terhadap SDG's ke 6



Ketahanan air untuk mendukung sektor-sektor strategis, pencegahan bencana, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Tahun 2045, Bangsa Indonesia sebagai "NEGARA" akan berumur satu abad atau 100 tahun. Visi Indonesia 2045 adalah Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur. Ya, belakangan kita menerima informasi melalui berbagai media, media sosial, dan banyak beredar melalui daring mengenai dokumen ini. Masyarakat bisa membaca, mengetahui, dan ikut merasakan ambisi dan bersama-sama bergerak menuju titik-titik visi itu. Ambisi ini yang sedang digerakkan oleh pemerintah dengan cara membumikan sasaran yang akan dituju oleh semua pihak sebagai "BANGSA" menuju apa yang disebut Indonesia Emas 2045. Pilar pembangunan Indonesia 2045 terdiri dari 4 pilar yaitu; 1) Pembangunan Manusia serta Penguasaan Iptek, 2) Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan, 3) Pemerataan Pembangunan, dan 4) Ketahanan Nasional dan Tata Kelola

Pemerintahan.

Pilar Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan menargetkan Indonesia menjadi negara maju dan salah satu ekonomi terbesar di dunia dengan digerakkan oleh investasi dan perdagangan, industri, pariwisata, maritim, serta jasa yang didukung infrastruktur yang andal, kokohnya ketahanan pangan, air, dan energi yang kuat. Dengan demikian, komitmen terhadap lingkungan hidup harus terus dijaga bagi keberlanjutan pembangunan.

Masalah air sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030 yang menjadi tujuan pembangunan dunia. Dalam SDGs, permasalahan air menjadi Tujuan ke-6 yaitu Air Bersih dan Sanitasi Layak.

Sangat logis bila air menjadi isu strategis saat ini dan kedepan karena air merupakan prasyarat mutlak dalam mendukung perikehidupan dunia.

Menanggapi isu strategis nasional dan global seperti ini, Bidang Pemetaan

Dinamika Sumberdaya Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas terus menerus beradaptasi memenuhi, berkontribusi, dan menjawab permasalahan kebutuhan air, akses terhadap air, serta pemenuhan air bersih yang menjadi jaminan pembangunan yang berkelanjutan. [Januari 2019]

BIG dan Kemendikbud Disatukan melalui Atlas

Kolaborasi antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dirasakan sangat penting dan mendesak saat ini. Gerakan Literasi Nasional (GLN) merupakan momen yang sangat pas untuk menindaklanjuti kolaborasi formal kedua institusi ini. Beberapa tahun terakhir, BIG konsen menyusun atlas bertema pendidikan untuk berbagai jenjang pendidikan. Setelah sukses menyusun Peta dan Atlas Pendidikan untuk SMP, tahun 2019 ini melalui Bidang Atlas dan Pemetaan Sosial kembali menyusun Atlas Pendidikan dan Budaya untuk jenjang SMA. Tujuan pembuatan atlas tersebut adalah sebagai salah satu suplemen sumber pembelajaran terkait informasi geospasial.

Melalui media atlas, program GLN khususnya geoliterasi atau mencerdaskan secara spasial ditambatkan. Melalui atlas, mengenal wilayah NKRI beserta potensi sumberdaya abiotik, biotik dan kultural sekaligus potensi bencana, diharapkan transfer pengetahuan terkait keruangan dapat dengan mudah tersampaikan kepada peserta didik. BIG bersama-sama dengan Kemendikbud harus makin sering duduk bersama merumuskan kurikulum dan konten informasi geospasial yang akan dijadikan suplemen bahan ajar di setiap level pendidikan. Selain melalui pembelajaran

formal, informasi geospasial juga perlu disebarluaskan kepada masyarakat umum, baik lokal maupun mancanegara.

Akhir Februari 2019, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dibawah Kemendikbud juga mengusulkan kerjasama dengan BIG dalam rangka penyusunan peta dan atlas terkait sebaran lokasi dan informasi warisan-warisan dunia, *geopark* maupun cagar biosfer yang ada di Indonesia. Hal ini juga merupakan momen penting yang perlu ditindaklanjuti agar situs warisan budaya yang telah diakui dunia dapat dituangkan dalam sajian informasi geospasial yaitu bentuk peta dan atau atlas. Diharapkan informasi ini dapat tersampaikan dengan baik kepada para pengambil kebijakan maupun khalayak umum, sehingga masyarakat dapat ikut serta menjaga keberadaannya.

Masih banyak hal yang dapat dieksplorasi dan dituangkan di dalam atlas yang perlu disampaikan kepada masyarakat luas, yang pada akhirnya menginspirasi dan membuka wawasan kewilayahan dan fenomenanya. Akhirnya, kolaborasi kedua institusi pemerintah ini dirasa sangat *urgent*, dimana BIG dan Kemendikbud disatukan melalui atlas. [Februari 2019]

Peningkatan Kualitas Peta Tata Ruang

Selama bulan Maret 2019 ini BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas telah mengeluarkan sedikitnya lima belas (15) rekomendasi peta tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah, baik tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota maupun rencana detail tata ruang. Jumlah ini tentu menambah kuantitas wilayah yang telah direkomendasi peta tata ruangnya, status akhir dapat dilihat di tataruang.big.go.id. Peningkatan kualitas peta tata ruang dilakukan melalui pemeriksaan ketelitian geometris, tematis dan aspek kartografis serta kesesuaian antara rancangan perda dengan peta yang digambarkan.

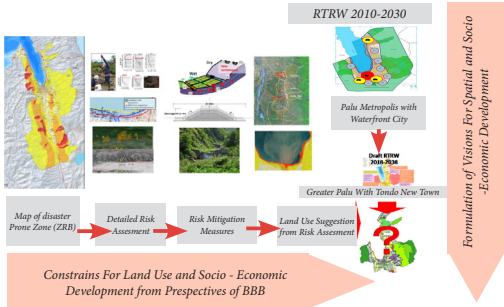
Selain memperhatikan acuan IGD (informasi geospasial dasar), peta tata ruang wajib pula memperhatikan keakuratan tematis. Aspek tematik bahkan menjadi penentu dalam kualitas peta tata ruang yang dihasilkan. Unsur tematik yang wajib ada adalah keakuratan informasi atau atribut yang dituliskan, terutama informasi jenis bencana, informasi jenis program strategis nasional yang ada, informasi unsur lingkungan, mengakomodir unsur pertanian, dan memperhatikan kawasan lindung.

Beberapa aspek terkait kualitas peta tata ruang yang sering dijumpai dari peta tata ruang yaitu: aspek unsur dasar yaitu : penarikan deliniasi unsur dasar belum tepat, basis data spasial khususnya toponimi, fasilitas umum dan fasilitas sosial masih belum lengkap, batas administrasi belum definitif, dan garis pantai masih menggunakan data lama. Aspek tematik yaitu: peta tematik terutama jaringan pergerakan belum tergambarkan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% sesuai

yang diamanahkan, umumnya pemda kesulitan memenuhi angka tersebut, khususnya RDTR yang secara umum masih dibawah 15% dan agak sulit memaksakan 30% kecuali memasukkan zonasi LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan), karena sebenarnya LP2B adalah lahan yang ditetapkan untuk dilindungi secara konsisten sebagai lahan pertanian pokok, KRB (kawasan rawan bencana) digambarkan pada skala yang tersedia, wilayah sempadan sungai dan pantai tidak digambarkan karena terdapat pemanfaatan lain seperti pemukiman atau penggunaan lain.

Kualitas aspek tematik lain yang sering ditemukan terutama minimnya data satuan kemampuan lahan (SKL) sebagai arahan rencana tata ruang belum tergambarkan atau tidak adanya data rencana pada pola dan struktur ruang, tata ruang hanya digambarkan sesuai dengan eksisting pemanfaatan lahan. Aspek kartografis berupa belum sesuainya simbol yang digunakan dengan ketentuan yang di atur dalam PP No. 8/2013 tentang ketelitian peta tata ruang. Tata ruang kedepan adalah tata ruang yang memuat keakuratan tematis terukur sejalan dengan adanya peningkatan pada keakuratan unsur dasar. **[Maret 2019]**

PENINGKATAN KUALITAS RENCANA TATA RUANG DI WILAYAH TERDAMPAK BENCANA PALU MELALUI PENGUATAN IGT KEBENCANAAN



What is the best strategy for socio-economic development and reconstruction from disaster ?

Pembuatan Peta Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 dari BIG di wilayah terdampak bencana Kota Palu dan sekitarnya telah selesai secara maksimal. Kondisi ini sangat menggembirakan karena perencanaan tata ruang yang sedang disusun pasca bencana di wilayah Palu dan sekitarnya menjadi semakin akurat. Peta RBI skala besar memberikan data fisik yang berguna dalam memahami kondisi setelah terjadi bencana. Peta dasar atau informasi geospasial dasar ini sebagai basis integrasi seluruh peta-peta tematik pendukung peta tata ruang bereferensi spasial yang sama. Dalam konteks inilah maka peran peta-peta

dasar dan tematik semakin nyata dalam penyusunan tata ruang. Analisis spasial atau keruangan yang dilakukan untuk penyusunan peta rencana struktur ruang dan pola ruang, membutuhkan banyak peta tematik fisik terutama aspek tematik kebencanaan.

Untuk memperkuat analisis fisik khususnya kebencanaan tersebut, maka Kementerian PPN/Bappenas melibatkan bantuan dari JICA untuk membuat beberapa peta tematik kebencanaan yang dapat mendukung analisis tersebut.

Rapat koordinasi untuk melancarkan tujuan kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2019 di Kementerian Agraria dan Tata Ruan/BPN, dengan mengundang beberapa kementerian lembaga terkait antara lain Badan Geologi Kementerian ESDM, BNPB, BIG serta BMKG. Hal yang dibahas pada rapat koordinasi tersebut adalah rencana survei dan pemetaan tematik kebencanaan oleh JICA. Peta-peta tematik yang akan dibuat adalah :

1. Peta risiko bencana tsunami
2. Peta risiko bencana likuifaksi
3. Peta risiko bencana banjir
4. Peta risiko bencana sedimen

Seluruh peta-peta ini akan mendukung penyusunan rencana tata ruang yang baru pasca bencana di wilayah Palu, dan sekitarnya dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Analisis tata ruang akan

dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dengan memanfaatkan data-data tersebut.

BIG melalui Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas, diminta untuk ikut mendampingi dan mensupervisi proses pelaksanaan pengumpulan data dan lapangan dan penyusunan peta-peta tematik ini untuk keperluan penyusunan rencana tata ruang. Dengan semakin akuratnya peta-peta tematik untuk penyusunan tata ruang ini diharapkan produk-produk rencana tata ruang juga semakin berkualitas untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Saat ini adalah era dimana informasi geospasial tematik sangat berperan dan menentukan kualitas rencana tata ruang Indonesia. [April 2019]

Neraca SDA-LH sebagai instrumen untuk Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan di Indonesia seharusnya memperhatikan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut Ditjen Planologi dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 terdapat 2 sasaran Besar Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sasaran pertama yaitu bagaimana menjaga keberlanjutan *supply* daya dukung daya tampung lingkungan hidup, yang terdiri dari 3 *milestone* yaitu menahan laju penurunan, menjaga keberlanjutan, dan menaikkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup.

Dalam rangka mendukung sasaran besar di atas, sesuai mandat pasal 6 dan pasal 9 PP 46/2017, dengan target 10 November 2019, perlu percepatan penyusunan

peraturan tentang tata penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Lingkungan Hidup (SDA-LH) dan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto Lingkungan Hidup (PDRB LH). Untuk itu, Kementerian Perekonomian menyusun Kelompok Kerja (Pokja) dan *roadmap* tata cara penyusunan Neraca SDA-LH dan PDB/PDRB-LH. Terdapat 3 Pokja dalam penyusunan *roadmap* Neraca SDA-LH dan PDB/PDRB-LH yaitu: Pokja regulasi/kebijakan tata cara penyusunan, Pokja data protokol dan manajemen, dan Pokja metodologi. Anggota Pokja tersebut terdiri dari beberapa Kementerian/Lembaga, antara lain: Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, BPS, dan BIG.

Bidang Pemetaan Dinamika Sumberdaya (PDS) BIG turut berperan aktif di dalam Pokja ini sesuai dengan bisnis proses dalam penyusunan Pemetaan Neraca Sumberdaya Alam. Kedepan, Bidang PDS akan mengembangkan metodologi sebagai masukan pertimbangan KLHS. Disamping itu, neraca SDA yang disusun juga mengkomodir analisis prediksi

penggunaan lahan dan penggunaan air. Agar kementerian/lembaga/pemda dapat melakukan analisis ini, maka bidang PDS akan membuat spesifikasi terkait hal tersebut. Dalam konteks Pokja bersama, diharapkan masukan dari BIG dalam Pokja Neraca SDA LH dapat digunakan secara nasional. [Mei-Juni 2019]

ICA dan Atlas

Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan instansi pemerintah yang menjalankan tugas utama terkait dengan informasi geospasial. Dalam menjalankan tugasnya, BIG tidak hanya berjalan sendiri, namun juga harus berkolaborasi dan bersinergi dengan negara-negara lain yang tergabung dalam organisasi internasional (OI), utamanya terkait informasi geospasial. Dengan mengikuti OI tersebut BIG dapat berdiskusi, bertukar pikiran dan pengalaman, unjuk prestasi sekaligus mengetahui kekurangan dan kemajuan negara lain sehingga dapat memacu kinerjanya kearah lebih baik lagi. Organisasi internasional yang diikuti BIG antara lain *United Nations Group of Expert on Geographical Names* (UNGEGN) yaitu Kelompok Ahli/expert PBB untuk Nama Geografis, *International Cartographic Association* (ICA), *International Union of Geodesy and Geophysics* (IUGG) dan beberapa OI profesi lain. Dua nama yang disebut terakhir, BIG sempat dipertanyakan status keanggotaannya. BIG diminta menjelaskan di depan kelompok kerja (pokja) yang mengurus OI dibawah koordinasi Kementerian Luar Negeri terkait arti penting dan manfaatnya menjadi anggota ICA dan IUGG bagi BIG dan Indonesia pada umumnya.

ICA merupakan organisasi non profit (nirlaba) internasional yang bergerak dalam forum ilmiah terkait perkembangan, isu terkini, dan teknik kartografi dan *Geospatial Information (GI) Science*. Tujuan ICA adalah untuk memastikan bahwa kartografi dan *GI Science* digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan melalui representasi disiplin ilmu dan profesi kartografi dan *GI Science* secara internasional. BIG mempunyai tugas dan fungsi utamanya dalam penyelenggaraan informasi geospasial, dimana untuk menjalankan tugas ini tidak terlepas dari teknologi dan sains terkait kartografi dan informasi geospasial. Melalui forum pertemuan dalam ICA inilah, BIG melalui PPTRA Pusat (Pemetaan Tata Ruang dan Atlas) menimba ilmu mengenai dunia pemetaan negara lain.

Salah satu tugas PPTRA adalah menyusun atlas berbagai tema baik untuk tujuan pendidikan, pembangunan nasional maupun tema lain yang akan digunakan secara langsung oleh masyarakat luas. Dengan adanya ICA, dapat menjadi ajang bertukar ilmu, pengetahuan dan pengalaman terkait teknologi kartografi khususnya dan informasi geospasial secara luas dengan berbagai negara diseluruh dunia.



ICA mempunyai kurang lebih 27 komisi dan kelompok kerja, diantaranya adalah komisi *Art and Cartography*, *Atlases*, *Cartography and Children*, *Map and Graphic for Blind and Partially sighted people*, dan komisi teknis lain, dimana komisi-komisi tersebut sangat sejalan dengan apa yang telah dilakukan oleh BIG hingga saat ini.

Selama ini, keikutsertaan BIG dalam program ICA antara lain mengikuti *International Cartographic Conference* (ICC) yang diselenggarakan setiap dua

tahun sekali dan mengikuti Lomba Gambar Barbara Petchenik. Gambar peta anak Indonesia dikirim oleh BIG sebagai penyelenggara lomba gambar nasional yang hasilnya dikirim ICC pada Barbara Petchenik Award. Pada kurun 2011 – 2015 salah satu personil BIG ditunjuk menjadi *Vice President* – ICA dan juga menjadi wakil komisi pada *Cartographic and children*. Hal ini merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan yang tiada tara bagi BIG dan Bakosurtanal waktu itu. **[Juli 2019]**

Peran BIG dalam Penyusunan Neraca SDA sebagai Masukan Pencantuman Nilai SDA pada LKPP

Nilai sumberdaya alam (SDA) mulai menjadi perhatian Kementerian Keuangan khususnya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Hal ini mengingat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disusun selama ini belum mencantumkan nilai terkait dengan SDA. Salah satu penyebabnya adalah dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) prinsip dasar pengungkapan pada laporan keuangan adalah obyektivitas,

terukur, terverifikasi dan handal, sehingga untuk dapat mencantumkan nilai SDA tersebut memerlukan upaya yang cukup besar. Namun seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal yang sebelumnya sulit akan menjadi lebih mudah.

Mengingat urgensi nilai SDA pada LKPP, maka penyusunan pemetaan neraca SDA merupakan langkah yang sangat penting untuk ditempuh, sebagaimana yang telah dilakukan negara lain seperti Kanada, Perancis, dan Norwegia.

Usaha negara-negara tersebut bahkan telah terintis sejak tahun 1970. Satu hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan neraca SDA adalah kesamaan pemahaman dan persepsi antara pemerintah, *stakeholder* dan auditor (BPK). Pencantuman nilai SDA ini menurut Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain (PNKNL) merupakan amanat dari Badan Pemeriksa Keuangan-Republik Indonesia (BPK-RI) berdasarkan hasil *review* pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2018. Hasil *review* tersebut menyebutkan bahwa pemerintah perlu mencantumkan perkiraan tahunan volume dan nilai aset SDA, volume dan nilai penjualan tahun sebelumnya, serta pendapatan fiskal dari pengelolaan SDA dalam LKPP.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Pada Bab II Pasal 4 disebutkan bahwa Neraca SDA dan LH merupakan instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi disamping 3 instrumen lain, yaitu penyusunan PDB dan PDRB LH, kompensasi/imbalance jasa lingkungan hidup antar daerah dan internalisasi biaya lingkungan hidup.

Dalam hal penyusunan Neraca ini, BIG dapat bekerjasama dengan BPS dalam penyediaan Pemetaan Neraca SDA dan data pemetaan tematik skala kecil – menengah. BPS juga menyediakan data statistik Neraca SDA yang terdapat dalam publikasi Sistem Neraca Lingkungan-Ekonomi Indonesia (SISNERLING). Saat ini sedang dilakukan rapat-rapat Pokja Neraca SDA-LH untuk menyusun peraturan teknis turunan dari PP No. 46 tahun 2017. Peran serta BIG sangat diharapkan terutama dalam penyediaan peta penutup lahan skala kecil – menengah setiap tahun (multi temporal) dengan kelas tutupan lahan sesuai dengan SNI Neraca SDA tahun 2015. Dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang perlu dibenahi antara lain:

1. belum ada bisnis proses yang menyeluruh terhadap penyusunan Neraca SDA-LH di tingkat pemerintah pusat,
2. belum adanya kesamaan metodologi antar Kementerian dan Lembaga walaupun sudah ada SNI Neraca SDA,
3. masih terbatasnya data multi temporal dalam penyusunan Neraca SDA-LH. [Agustus 2019]

Perlunya Data Detail untuk Pencapaian Tujuan dalam SDGs

A genda global *Sustainable Development Goals* (SDGs) diadopsi dan dijalankan di Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk memenuhi target 17 Tujuan TPB hingga tahun 2030. Semua pemangku kepentingan yaitu pemerintah, perguruan tinggi, filantropi dan organisasi masyarakat berperan dalam pelaksanaan pencapaian

TPB tersebut sesuai tugas pokok masing-masing, tidak terkecuali BIG. BIG sesuai tugas dan fungsinya menampilkan data/informasi spasial terkait TPB.

Namun hingga kini, ketersediaan data masih menjadi kendala. BPS baru bisa menyediakan sekitar 83 dari 117 indikator level nasional, 67 dari 105 indikator level provinsi dan sisanya data berasal dari Kementerian dan Lembaga lain.

Data BPS semua berasal dari hasil sampling yang pada akhirnya merupakan data agregat dengan *scope* nasional. Jika melihat kembali tujuan dari dilaksanakannya TPB adalah tidak ada orang yang tertinggal (*no one left behind*), maka data yang ada saat ini belum ada kesesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan sumber data, terutama terkait kedetailan data. Jika kita ingin mengejar hingga *no one left behind* maka dibutuhkan data yang sangat detail. Data sangat detail ini merupakan tanggung jawab daerah, karena hanya mungkin dikumpulkan pada level terkecil misalnya RT/RW/Desa/Kelurahan, berangsur-angsur dikumpulkan ke level lebih tinggi yaitu kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional. Namun apakah mungkin data sangat detail bisa didapatkan untuk seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas ini?. Tentu perlu kerja keras semua sektor.

Hal ini bisa tercapai jika *mindset* pengumpulan data diubah, yaitu pengumpulan data dimulai dari bawah atau level terkecil (RT/RW/Desa atau Kelurahan) kemudian dikumpulkan ke

level atasnya, demikian seterusnya hingga level nasional. Pemanfaatan sebagian dana desa dapat menjadi alternatif solusi dalam pembiayaan pengumpulan data. Sedangkan sumberdaya manusianya bisa dilakukan dengan mengerahkan masyarakat dan juga mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik dengan Perguruan Tinggi sebagai pendamping. Data sangat detail ini juga harus tetap diperbaharui setiap saat ada perubahan. Kondisi seperti ini hanya memungkinkan bila masyarakat wilayah tersebut yang ditunjuk memperbaharui data, bukan menunggu saat sensus dilaksanakan. Semoga alternatif pengumpulan data dari level paling bawah ini dapat menginspirasi pengambil kebijakan, sehingga *no one left behind* benar-benar dapat terwujud. [September 2019]